



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

RENCANA KERJA TAHUN 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 00.23/ 315 / 112 TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang sudah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, perlu dilakukan pengesahan oleh Walikota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Magelang tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 untuk Perangkat Daerah se-Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 6 Agustus 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 050.23/315/712 TAHUN 2020
 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
 TAHUN 2021

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	170.738.771.000
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	90.927.611.000
3	Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang	197.072.172.080
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	26.990.000.000
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	28.859.776.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	7.753.451.000
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Magelang	4.179.938.000
8	Dinas Sosial Kota Magelang	5.801.161.000
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	3.873.908.000
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	27.794.475.900
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	2.762.725.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	5.646.790.000

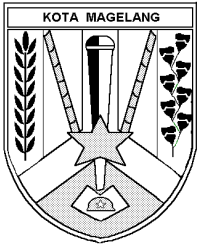
NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	8.974.100.000
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	7.793.127.000
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	2.994.429.000
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	10.016.898.100
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	4.436.563.000
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	5.757.333.000
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	12.344.859.000
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.852.913.000
20	Sekretariat Dewan Kota Magelang	18.010.858.000
21	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	731.375.000
22	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	600.606.400
23	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan	2.304.477.000
24	Sekretariat Daerah - Bagian Umum	19.881.194.000
25	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	356.616.000
26	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan	465.000.000
27	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.175.826.000
28	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	236.413.000
29	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan	737.388.000
30	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	5.543.447.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
31	Kelurahan Jurangombo Selatan Kota Magelang	640.581.000
32	Kelurahan Jurangombo Utara Kota Magelang	570.999.000
33	Kelurahan Magersari Kota Magelang	697.223.000
34	Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang	632.307.000
35	Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang	605.832.000
36	Kelurahan Tidar Utara Kota Magelang	665.619.000
37	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	5.822.112.000
38	Kelurahan Cacaban Kota Magelang	720.954.000
39	Kelurahan Gelangan Kota Magelang	705.004.000
40	Kelurahan Kemirirejo Kota Magelang	630.993.000
41	Kelurahan Magelang Kota Magelang	767.409.000
42	Kelurahan Panjang Kota Magelang	637.388.000
43	Kelurahan Rejowinangun Utara Kota Magelang	790.942.000
44	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	5.399.715.657
45	Kelurahan Kedungsari Kota Magelang	727.500.000
46	Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang	678.064.000
47	Kelurahan Kramat Utara Kota Magelang	719.249.000
48	Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang	767.466.000
49	Kelurahan Wates Kota Magelang	864.148.000
50	Inspektorat Kota Magelang	5.652.513.000
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	4.507.804.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	32.508.886.000
53	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	23.256.498.000
54	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang	2.579.904.000
	TOTAL	779.163.267.137

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Jend. Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363695 (5 lines) Fax : (0293) 364910
MAGELANG
56101

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NOMOR : 050 / 200 / 440 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan mempunyai rencana tahunan (Renja OPD) sebagai penjabaran dari rencana lima tahunan (Renstra OPD);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

17. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang;
18. Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.23/315/112 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;
19. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021
- KESATU : Mengesahkan Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2021.
- KEDUA : Renja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Nomor 900/649/440 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Sistematika Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BPKAD KOTA MAGELANG
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN BPKAD KOTA MAGELANG
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD KOTA MAGELANG
BAB V	: PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....xiv

DAFTAR TABEL.....xv

BAB I.....1

PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum.....3

1.3. Maksud dan Tujuan.....5

1.4. Sistematika Penulisan.....5

BAB II..... 6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2019 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2019 dan Capaian Renstra
BPKAD Kota Magelang 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Magelang.....20

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota
Magelang.....24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....28

BAB III.....42

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....42

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....42

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
Magelang.....44

3.3. Program dan Kegiatan.....48

BAB IV.....60

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....60

BAB V.....69

PENUTUP.....69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Penetapan APBD Kota Magelang.....	7
Tabel 2.1.2	Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan BPKAD Kota Magelang.....	9
Tabel 2.1.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang s.d Triwulan II Tahun 2020.....	12
Tabel 2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang.....	22
Tabel 2.4	Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Magelang.....	30
Tabel 3.1	Identifikasi Isu-isu Strategis Pelayanan OPD.....	43
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021.....	42
Tabel 3.3.1	Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Magelang.....	51
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu disusun RKPD Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan KUA-PAS yang nantinya ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2021. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pengelolaan keuangan dan aset daerah tahunan Pemerintah Kota Magelang dengan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program SKPD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2020.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja SKPD. Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang

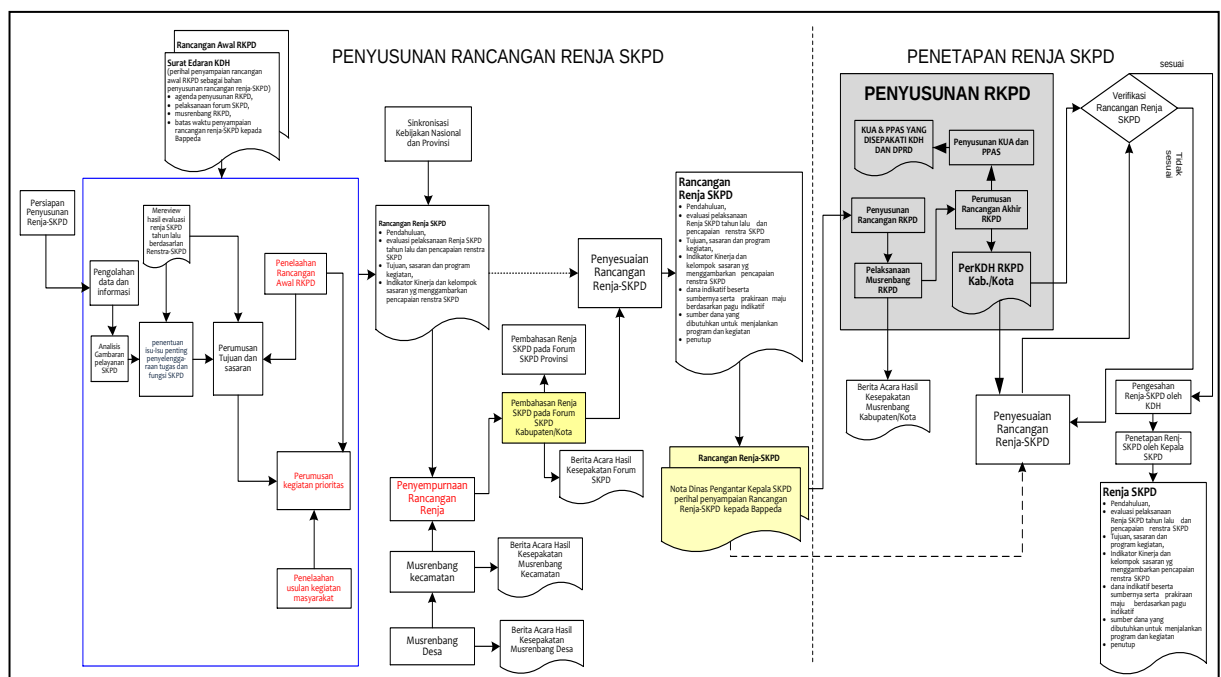
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan;
- b. Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021;
- c. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota;
- d. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Di dalam penyusunan RENJA 2021 BPKAD Kota Magelang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang di susun dengan mengacu pada Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu “MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”. Perumusan visi tersebut disesuaikan dengan bidang tugas dari BPKAD Kota Magelang. Adapun untuk Misi dari BPKAD Kota Magelang untuk tahun 2016-2021 adalah mendukung pada Misi yang pertama, yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021 merupakan rencana pelaksanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Magelang Tahun 2021. RKPD Kota Magelang mempunyai nilai yang sangat strategis dalam melandasi pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang tahun 2021 dikarenakan tahun tersebut merupakan masa transisi pergantian kepemimpinan kepala daerah dan memasuki periode keempat tahapan lima tahunan RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025, sehingga bertepatan pula dengan penyusunan rancangan RPJMD 2021-2025. Dilihat dari sudut pandang perencanaan, maka prioritas pada Renja 2021 layak diberikan untuk mengakomodasi akselerasi pencapaian target-target pada RPJMD 2016-2021. Adapun Tata Cara Penyusunan Rancangan Renja OPD seperti yang kami Gambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Penyusunan Rancangan Renja OPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2021 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
 12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
 13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021;
 16. Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.23/315/112 Tahun 2020 tanggal 6 agustus 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2021 bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Tujuan dibuatnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPKAD agar terarah;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di BPKAD;
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di BPKAD.

Dengan demikian dokumen Renja BPKAD Tahun 2021 ini sebagai pedoman dan arah di dalam menyusun anggaran BPKAD dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA APBD Tahun Anggaran 2021 oleh Kepala BPKAD Kota Magelang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan Capaian sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKAD KOTA MAGELANG TAHUN 2020

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2020 dan Capaian Renstra BPKAD Kota Magelang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda tersebut dinyatakan bahwa BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum tugas BPKAD adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar tugas tersebut maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah; pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah; pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung; pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah; serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Dalam pengelolaan keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang telah melakukan siklus utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah yang baik di dalam setiap siklus utama tersebut, haruslah memperhatikan 3 (tiga) pilar yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Ketiga pilar tersebut digunakan untuk mewujudkan *good governance* pada BPKAD Kota Magelang khususnya dan Pemerintah Kota Magelang pada umumnya. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah. Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBN/APBD. Proses

perencanaan dan penganggaran di Kota Magelang telah dilakukan tepat waktu. Selama beberapa kurun waktu, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan APBD pada bulan Desember tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.1 Penetapan APBD Kota Magelang

NO	TAHUN	PERATURAN DAERAH	TANGGAL
1	2015	Perda Nomor 8 Tahun 2014	29 Desember 2014
2	2016	Perda Nomor 9 Tahun 2015	21 Desember 2015
3	2017	Perda Nomor 14 Tahun 2016	23 Desember 2016
4	2018	Perda Nomor 13 Tahun 2017	20 Desember 2017
5	2019	Perda Nomor 11 Tahun 2018	14 Desember 2018
6	2020	Perda Nomor 12 Tahun 2019	13 Desember 2019

Sumber: Bidang Anggaran, BPKAD Tahun 2020

Sejak tahun 2004, dengan diterbitkannya UU nomor 25 Tahun 2004, telah digaungkan sinkronisasi dan integrasi sistem perencanaan. Pada tahun 2017, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan pembangunan. Kewajiban yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2019 dengan melakukan pengintegrasian sistem informasi yang digunakan pada proses perencanaan dan penganggaran. Pada siklus perencanaan, sistem aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sedangkan pada ranah penganggaran menggunakan e-budgeting. Pengintegrasian kedua sistem tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tentulah akan memiliki dampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang akan dilakukan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada proses perencanaan dan penganggaran ini juga memperhatikan beberapa hal dalam penyusunan rencana kerja, yakni salah satunya adalah penggunaan Standar Analisis Belanja (SAB). SAB ini merupakan penilaian kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Pemerintah Kota Magelang telah memberlakukan penggunaan SAB sebagai salah satu komponen yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pada saat Pemerintah Kota Magelang menggunakan system aplikasi e-budgeting, pada tahun 2018, SAB yang semula tidak bisa terintegrasi ke dalam sistem aplikasi yang digunakan menjadi bisa terintegrasi ke dalam sistem aplikasi yang digunakan pada proses penganggaran. Hal tersebut sangat membantu agar OPD dapat disiplin untuk

menjadikan sebagai salah pertimbangan dalam menyusun RKA. SAB Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2018. Ditetapkannya SAB melalui perkara akan mengikat OPD untuk konsisten dalam menerapkan SAB tersebut sehingga diharapkan penggunaan anggaran belanja menjadi efisien dan efektif.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI. Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah berbasis AkruaI sejak tahun 2015. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip berbasis akuntansi, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Magelang sudah terlaksana dengan baik dan akuntabel. Kinerja Sasaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan BPKAD Kota Magelang pada RPJMD 2016-2021 sampai dengan Semester I tahun 2020 terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.2

Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan BPKAD Kota Magelang

Indikator Kinerja	2016		2017		2018		2019		2020 (TW II)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Nilai Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Derajat Otonomi Fiskal	21.40	21.77	25.86	23.49	29.82	24.68	31.96	25.29	33.88	27.72
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat	80.27	75.00	73.66	66.29	69.67	66.02	67.45	66.04	65.79	67.93

Indikator kinerja sasaran fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan terdiri dari 3 (tiga) indikator. Berdasarkan tabel di atas, terkait indikator nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2016 dan opini WTP ini dapat dipertahankan hingga tahun 2019. Walaupun demikian, masih ada catatan atas LKPD yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Magelang yaitu terkait aset. Namun secara umum, perolehan opini WTP bagi Pemerintah Kota Magelang menunjukkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang sudah baik. Indikator Derajat Otonomi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Dana Pusat, menunjukkan tingkat kemampuan Kota Magelang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada tabel diatas capaian kinerja indikator Derajat Otonomi Fiskal, atau sering disebut juga dengan Desentralisasi Otonomi Fiskal. Capaian kinerja indikator Derajat Otonomi Fiskal, atau sering disebut juga dengan Desentralisasi Otonomi Fiskal, mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Capaian tren indikator kinerja ini pada tahun 2016 sebesar 101% pada tingkat Cukup Tinggi (CT) dan menurun terus pada tingkat Tinggi (T) yaitu sebesar 79% pada tahun 2019 dan sebesar 82% pada triwulan II tahun 2020 . Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari realisasi per-tahunnya, maka Derajat Otonomi Fiskal masuk ke tingkat Sangat Rendah (SR) karena berada dibawah 50%. Hal ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam menyelenggarakan desentralisasi, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan, serta kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut masih

sangat rendah. Rendahnya Derajat Otonomi Fiskal juga menunjukkan bahwa PAD belum optimal dalam membiayai pembangunan daerah.

Capaian kinerja indikator Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana Pusat fluktuatif pula. Pada tahun 2016, capaian kinerja indikator ini mencapai 106% dan terus mengalami penurunan hingga 96% pada triwulan II tahun 2020. Capaian kinerja indikator Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada pada tingkat Sangat Tinggi (ST). Namun apabila melihat pada realisasi setiap tahunnya, besaran dari realisasi indikator ini fluktuatif pada tingkatan Sedang (S). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi untuk membiayai pembangunan dan menyelenggarakan layanan publik di Kota Magelang masih cukup besar.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target hasil/keluaran sesuai yang direncanakan sebanyak 7 kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - c. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - d. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - e. Kegiatan Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - f. Kegiatan Penyusunan Laporan Data Potensi Subyek dan Obyek Pajak;
 - g. Kegiatan Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB.
2. Dari 7 (tujuh) program dan 125 (seratus dua puluh lima) kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2020, prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan/berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan mencapai sebesar 92% atau 115 (seratus lima belas) kegiatan. Dengan asumsi bahwa keseluruhan lima belas kegiatan tersebut ada yang melampaui target, sama dengan target dan dibawah target. Adapun kegiatan yang sama sekali belum berjalan atau dilaksanakan sebanyak 10 kegiatan.
3. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2020 sampai dengan triwulan II baru mencapai 35,95% atau sebesar Rp. 5.791.705.107,00,- dari total anggaran sebesar Rp. 16.109.925.000,00,-. Adapun

target fisik yang harus dicapai sebesar 64,56% dengan realisasi mencapai nilai 65,70%.

4. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak terdapat di dalam Renstra namun terdapat dalam Renja yaitu Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah, Kegiatan Penyusunan Peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perda tentang Penyertaan Modal, Kegiatan Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020 menyesuaikan dengan kondisi pemerintahan serta regulasi yang ada.
5. Secara umum faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran serta pelaksanaan dari kegiatan tersebut masih dalam proses dan belum selesai sepenuhnya. Disamping itu juga adanya ketentuan peraturan perundangan yang baru berlaku, sehingga beberapa kegiatan harus menyesuaikan aturan baru tersebut. Terjadinya pandemi COVID-19 secara global dan telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai Bencana Non Alam, berdampak pada aktifitas perekonomian yang mengalami gejolak sehingga berdampak pula pada berbagai sektor termasuk aktifitas/kegiatan pada pemerintahan.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1.3 berikut :

TABEL 2.1.3
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG S/D TRIWULAN II TAHUN 2020*)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 *)	Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 *)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	
2.18 . 4.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Teradministrasinya surat-surat dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	2 jenis	50,00%	2 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet untuk memperlancar pelaksanaan tugas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	5 jenis	41,09%	5 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan	64	Unit	77	STNK	77	STNK	77	STNK	100%	50 kendaraan	37,45%	50 kendaraan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya personil pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	43 orang	76,06%	43 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terwujudnya kebersihan di lingkungan BPKAD	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	22 jenis/item	61,94%	22 jenis/item	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	meningkatnya kelancaran tugas dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	48 jenis	99,53%	48 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	meningkatnya kelancaran tugas-tugas dinas	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	15 jenis	93,81%	15 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya alat penerangan	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	17 jenis	90,83%	17 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	menambah wawasan pengetahuan aparatur	2	Jenis	2	Jenis	2	jenis	2	Jenis	100%	3 surat kabar	55,48%	3 surat kabar	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya logistik kantor	24	Tabung	24	Tabung	24	tabung	24	Tabung	100%	2 jenis	52,35%	2 jenis	100%

4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	57 karyawan	75,40%	57 karyawan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	tercapainya koordinasi antar daerah	12	Bulan	12	Bulan	12	bulan	12	Bulan	100%	76 kegiatan	34,79%	76 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honor er daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga kontrak , petugas keamanan dan petugas lapangan	23	Orang	23	Orang	23	Orang	23	Orang	100%	8 orang (3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honor er daerah)	55,99%	8 orang (3 orang jaga malam, 1 orang sopir dan 4 orang tenaga kontrak/honor er daerah)	100%
4.04 . 4.04.01 . 01 . 26	Pengelolaan administrasi kepegawaian	kelancaran urusan kepegawaian	82	File	82	File	82	file	82	File	100%	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	61,00%	57 file (53 file PNS, 4 file Non PNS)	100%
4.04 . 4.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur														
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor			3	Jenis	3	jenis	3	Jenis	100%	2 unit	100%	3 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung terpelihara	1	Unit	1	Unit	1	unit	1	Unit	100%	1 unit	79,46%	1 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	64	Unit	70	Unit	70	unit	70	Unit	100%	50 unit	95,00%	50 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	33	Unit	41	Unit	33	unit	41	Unit	100%	7 jenis	73,00%	7 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan kantor	7	Jenis	8	Jenis	7	jenis	7	Jenis	100%	6 jenis	73,74%	6 jenis	100%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya sarana kerja kantor	20	Buah	29	Buah	20	buah	29	Buah	100%	27 buah	0%	0 buah	0%
4.04 . 4.04.01 . 02 . 36	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terbangunnya tempat parkir mobil, kanopi dan gudang di lingkungan BPKAD			237,00	m2	237,00	m2	237,00	m2	100%	3 unit	100%	3 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	tercapainya target kinerja skpd	12	Dokumen	12	Dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	12 laporan	98,21%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	tersedianya laporan keuangan semesteran, prognosis dan akhir	3	Laporan	2	Jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2 jenis laporan	91,48%	2 jenis laporan	100%

		tahun													
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	terwujudnya pedoman rencana kerja skpd	2	Dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 jenis dokumen	93,84%	2 jenis dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	terwujudnya pelaksanaan anggaran	2	Dokumen			2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	45,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	terwujudnya renstra OPD 5 tahunan					1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	50%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	spj yang diverifikasi dan disahkan	12	Bulan	1800	berkas	1.800	berkas	1.800	berkas	100%	1500 berkas	57,00%	1500 berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	1	Dokumen	1	Dokumen	2	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	97,62%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah														
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Sebagai pedoman bagi pengelola keuangan di jajaran Pemerintah Kota Magelang	1	Perwal	75	Buku	1	Dokumen	75	buku	100%	1 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Penetapan Perda tentang APBD TA. 2018	4	Dokumen	4	dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	100%	1 raperda	1,43%	1 raperda	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran APBD TA. 2018	3	Dokumen	3	dokume	3	Dokumen	3	dokumen	100%	3 dokumen	0,00%	3 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2017	4	Dokumen	4	dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	100%	1 raperda	0,08%	1 raperda	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan Perwal tentang penjabaran Perubahan APBD 2017	4	Dokumen	4	dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	100%	2 raperwal	59,02%	2 raperwal	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	520	Buku	1	Perda	520	Perda	1	perda	100%	1 Raperda	94,71%	1 Raperda	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	120	Buku	1	Perwal	120	buku	1	perwal	100%	1 Raperwal	94,73%	1 Raperwal	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Menambah kelancaran pelaksanaan tugas			2	aplikasi	29	OPD	2	aplikasi	100%	1 aplikasi	100%	1 aplikasi	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Termonitornya dan terpenuhinya laporan posisi kas daerah kepada Kementrian Keuangan RI setiap bulan					12	laporan	12	laporan	100%	12 Laporan	56,00%	12 Laporan	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 20	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUA 2018	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	37,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 21	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Nota Kesepakatan PPAS 2018	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0%	0 dokumen	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 22	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Nota Kesepakatan KUPA 2017	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0,00%	2 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 23	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Sebagai pedoman SKPD dalam menyusun RKPA 2017	2	dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2 dokumen	0,00%	0 dokumen	0%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 24	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal APBD 2018	48	SKPD	29	Opd	48	SKPD	29	Opd	100%	29 OPD	0,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 25	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	DPA SKPD yang disyahkan	48	SKPD	29	Opd	48	SKPD	29	Opd	100%	29 OPD	51,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 27	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Tertib Administrasi	370	berkas	500	Berkas	370	Bekas	500	bekas	100%	6 Laporan	75,00%	6 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 30	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Sebagai pengendali dalam pelaksanaan pengeluaran belanja	100	%	3000	SP2D	3.000	SP2D	3.000	SP2D	100%	5000 SP2D	59,20%	5000 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 32	Pengesahan dan penerbitan SPD	Sebagai dasar penerbitan SP2D	100	%	170	SP2D	100	SP2D	170	SP2D	100%	9 kegiatan	66,28%	9 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	612	Buku	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100%	720 dokumen	57,12%	720 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 42	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel	552	laporan	348	Laporan	348	laporan OPD	348	laporan OPD	100%	720 laporan	58,00%	720 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43	Pengendalian dan penerbitan SPM	terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd			1800	SPM	700	spm	1.800	Spm	100%	1700 SPM	99,97%	1700 SPM	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 44	Verifikasi dan Pergeseran Anggaran Kas	Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	100	%	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD; 29OPD; 29 OPD; 6 bulan	75,92%	29 OPD; 29OPD; 29 OPD; 6 bulan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 48	Penyusunan laporan pajak	tersedianya laporan pajak setiap bulan	84	Buku	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	88,85%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 49	Penyusunan Laporan Informasi Penganggaran Daerah	Laporan anggaran lebih transparan dan akuntabel	2	laporan	2	Laporan	2	laporan	3	laporan	100%	2 laporan	85,00%	2 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 51	Penyusunan anggaran kas	Sebagai rencana penarikan dana pada setiap triwulan	100	%	170	Dokumen	10	Kegiatan	170	dokumen	100%	9 Kegiatan	0,00%	9 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 52	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA sesuai dengan Perda dan Perwal penjabaran perubahan APBD 2017	48	SKPD	29	OPD	29	OPD	29	OPD	100%	29 OPD	50%	29 OPD	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 53	Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	DPPA opd yang disyahkan	48	SKPD	48	SKPD	29	SKPD	48	OPD	100%	29 OPD	0,00%	29 OPD	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 57	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	SP2D bantuan dan tak terduga sesuai dengan jumlah permohonan bantuan	100	%	2500	berkas	8000	Berkas	2.500	berkas	100%	1031 Berkas	70,00%	1031 Berkas	30%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 59	Penyusunan data keuangan daerah	Tersusunnya data keuangan daerah yang akuntabel	100	%			12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	58,71%	12 laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 60	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan terdatanya tertib administrasi laporan	100	%	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 Laporan	79,46%	12 Laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 61	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan SKPKD	Laporan bulanan PPKD	100	%	12	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	42,00%	12 laporan	50%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 65	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Meningkatnya kapasitas pengelola keuangan sekolah dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah					148	orang	148	orang	100%	74 sekolah	61,00%	74 sekolah	54%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 66	Workshop pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah					1	kegiatan	1	kegiatan	100%	60 pegawai	98,98%	60 pegawai	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 72	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan Keuangan yang Akuntabel	100	Orang	100	Orang	120	orang	100	Orang	100%	120 orang	54,92%	120 orang	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 77	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan SP2D	1350	SP2D	1400	SP2D	1.100	SP2D	1.400	SP2D	100%	1100 SP2D	51,79%	1100 SP2D	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 81	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja skpd	88	Buku	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1 dokumen	81,00%	1 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 91	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Kelancaran administrasi bansos	100	%	1500	Berkas	1.500	berkas	1.500	berkas	100%	1031 Berkas	69,60%	1031 Berkas	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 95	Penataan Sistem Administrasi Arus Berkas Penerbitan SP2D Belanja Langsung	Akuntabilitas keuangan SP2D	100	%	3000	berkas	4	Jenis informasi	3.000	berkas	100%	4 Jenis Dokumen	52,00%	4 Jenis Dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 104	Fasilitasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan tersedianya lapora			12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12 laporan	50,48%	12 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 15 . 107	Pembuatan Daftar Gaji	SP2D SKPD sebagai Alat akuntabilitas keuangan _ SP2D			1400	SP2D	470	Daftar gaji	1.400	SP2D	100%	470 Daftar Gaji	53,73%	470 Daftar Gaji	100%
	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah											2 kegiatan	100,00%	2 kegiatan	100%

4.04 . 4.04.01 . 15 . 114	Penataan Database Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya seluruh database pengelolaan keuangan guna memperlancar pelaksanaan tugas.			1	laporan	4	laporan	1	laporan	100%	6 laporan	53,98%	6 laporan	100%
---------------------------	---	---	--	--	---	---------	---	---------	---	---------	------	-----------	--------	-----------	------

4.04 . 4.04.01 . 18 . 16	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Tercapainya target PAD			350	Wajib pajak	540	wajib pajak	350	wajib pajak	100%	540 wajib pajak	61,00%	540 wajib pajak	100%
4.04 . 4.04.01 . 18 . 17	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Terselesaikannya Pengajuan Keberatan dan Pengurangan Wajib Pajak	50	SK	50	Sk	50	SK	50	SK	100%	30 SK	64,99%	30 SK	100%
	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	Tersusunnya laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB Terlayannya wajib pajak BPHTP										12 Laporan; 900 Wajib Pajak	65,09%	12 Laporan; 900 Wajib Pajak	100%
	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Tercapainya pendistribusian SPPT PBB										36200 SPPT	97,06%	36200 SPPT	100%
	Evaluasi Bulanan Dan Triwulanan Pendapatan Daerah	laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan										12 laporan	60,04%	12 laporan	100%
\	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek pajak PBB yang telah terdigitasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan										1 1 peta digitasi 1 kelurahan;	75,00%	1 1 peta digitasi 1 kelurahan;	100%
	Implementasi tapping box	laporan data transaksi elektronik per wajib pajak										12 laporan	69,20%	12 laporan	100%
	Penatausahaan administrasi pemungutan pajak reklame dan pajak air tanah	Tercapainya target pajak reklame dan PAT										800 SKPD; 960 SKPD; 12 Laporan; 12 Laporan	62,87%	800 SKPD; 960 SKPD; 12 Laporan; 12 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
4.04 . 4.04.01 . 19 . 01	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Tersedianya data untuk dijual			1	kegiatan	3	kegiatan	1	kegiatan	100%	2 kegiatan	12,42%	2 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 02	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Termanfaatkannya aset secara optimal	100	%	1	tahun	10	kegiatan	1	tahun	100%	4 kegiatan	39,41%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 04	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan	Berita acara penelitian dan			3	kegiatan	3	kegiatan	3	kegiatan	100%	4 Kegiatan	47,29%	4 Kegiatan	100%

	Barang Milik Daerah	penjualan dan/atau pemusnahan													
4.04 . 4.04.01 . 19 . 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Terwujudnya sarana olahraga pengelola barang yang layak dan nyaman	100	%	2	lapangan	2	lapangan	2	lapangan	100%	2 lapangan	43,53%	2 lapangan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	meningkatnya kenyamanan tugas	100	%	3	unit	3	unit	3	unit	100%	4 gedung kantor	41,37%	4 gedung kantor	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 11	Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan BMD	12	Bulan	12	bulan	12	bulan	12	laporan	100%	12 kegiatan	70%	12 keg	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 12	Penghapusan Asset	Terhapusnya aset-aset pemkot yang sudah tidak layak					2	paket	5	paket	100%	4 paket	32,65%	4 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 14	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Tersedianya informasi barang milik daerah	6	laporan	6	jenis	8	jenis	6	jenis	100%	6 jenis laporan	61,00%	6 jenis laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 15	Penjualan asset daerah	Bertambahnya pendapatan asli daerah	1	kegiatan	5	paket	3	paket	5	paket	100%	3 paket	46,40%	3 paket	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 16	Penyelamatan asset daerah	Teramankannya aset-aset daerah	12	kegiatan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	100%	12 Laporan	7,92%	12 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 17	Penaksiran barang milik daerah	Tersedianya data dalam rangka tindak lanjut atas aset yang telah ditaksir	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100%	4 kegiatan	41,35%	4 kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 18	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan kemampuan petugas pengelola BMD	4	kegiatan	4	kegiatan	29	OPD	4	kegiatan	100%	185 orang; 4 Laporan	46,00%	185 orang; 4 Laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD)	3	kecamatan	3	kecamatan	7	kategori	3	kecamatan	100%	4 Kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran); 5 Kegiatan	36,32%	4 Kategori (tanah untuk usaha pertanian, tempat tinggal, perdagangan/jasa, perkantoran); 5 Kegiatan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 20	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	tersusunnya rencana kebutuhan barang milik daerah	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	10 dokumen	47,26%	10 dokumen	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 22	Peningkatan status tanah yang dimohon warga	Terkendalinya pemberian hak atas tanah negara	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	3 Kegiatan	57,95%	3 Kegiatan	100%

4.04 . 4.04.01 . 19 . 23	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot	12	Bidang	12	bidang	12	Bidang	24	bidang	100%	12 bidang	1,69%	12 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 24	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Tersedianya data tanah milik Pemkot yang mutakhir	1	kegiatan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1 laporan	0,00%	1 laporan	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 25	Pengukuran pengembalian batas tanah milik Pemda	Terwujudnya batas fisik tanah	2	Bidang	2	bidang	2	bidang	2	bidang	100%	2 bidang	9,05%	2 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	terpenuhinya surat-surat kendaraan sesuai ketentuan					100 %	100%	100%	100%	100%	18 unit	16,42%	18 unit	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 27	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Pembayaran PBB untuk gedung kantor/rumdin/mess tepat waktu	100	%	6	SPPT	6	SPPT	6	SPPT	100%	20 SPPT	0,00%	20 SPPT	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 28	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Pembayaran PBB tanah milik Pemda	100	%	198	tanah	223	bidang	223	bidang	100%	223 bidang	0,00%	223 bidang	100%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Terwujudnya rumah dinas dan mess yang layak dan nyaman			6	rumah	7	rumah	7	rumah	100%	6 rumah dinas/mess	29,39%	6 rumah dinas/mess	70%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 31	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	terpeliharanya kendaraan dinas										18 unit	33,64%	18 unit	82%
4.04 . 4.04.01 . 19 . 32	Monitoring Penggunaan/Pemanfaatan Tanah atau Bangunan	Terpantaunya Penggunaan/Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Sesuai Tujuan	4	kegiatan	4	laporan	4	laporan	4	laporan	100%	4 laporan	58,19%	4 laporan	100%
	Penyediaan jasa pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpantaunya Pengelolaan Barang Milik Daerah										12 bulan	45,53%	12 bulan	100%
	Penatan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	Peningkatan Penatagunaan Tanah Pemkot dan Tersedianya Data Tanah Pemkot yang Akurat										3 Kecamatan	7,82%	3 Kecamatan	100%
	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kodifikasi Barang	Tersedianya Perwal tentang Kodifikasi Barang										1 perwal	100%	1 perwal	100%
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi Perangkat Daerah										2 bus	100%	2 bus	100%

Keterangan : *) Data sampai dengan Triwulan II 2019

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Magelang

Renja Tahun 2021 merupakan tahun kelima perencanaan pada Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 - 2021. Adapun penyusunan Renja 2021 berdasarkan pada RKPD Tahun 2021 yang mengacu pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025, yaitu untuk mencapai tujuan Magelang sebagai Kota jasa yang berbudaya, maju dan berdaya saing dalam masyarakat madani. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama, berdasarkan identifikasi masalah, mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah.

Pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang pada tahun 2020 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, yang berarti target dalam Renstra hampir semua tercapai atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi beban tahun yang bersangkutan. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 2.1.3 yang berisi Rekapitulasi, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

Wujud pelayanan BPKAD Kota Magelang dalam menunjang kinerja Fungsi Penunjang Keuangan adalah pelayanan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Inovasi-inovasi baru senantiasa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja tersebut. Inovasi tersebut diharapkan akan memudahkan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat termasuk juga wajib pajak. Inovasi yang dilakukan :

1. Aplikasi terkait BPHTB yaitu Si Bahenol
2. Aplikasi terkait retribusi online yaitu Si Retro
3. Aplikasi terkait retribusi pasar yaitu Bakul Pasar
4. Aplikasi terkait dengan PAD online yaitu Pak Dewo
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mitra melalui asistensi dan konsultasi Ruang Pojok Pintar
6. Penerapan IPAD (Integrasi Pendapatan Asli Daerah) dan sinkronisasi dengan sistem CMS (Cash Manajemen System) dari Bank Jateng
7. Pemasangan tapping box untuk memonitoring data hasil usaha WP apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan oleh WP
8. Penerapan e-tax dan e-retribusi untuk mempermudah pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi melalui sistem online
9. Penerapan Peta Digital guna memperoleh informasi detil tiap obyek pajak di Kota Magelang dengan Sistem Informasi Geografis dengan kondisi riil yang ada serta didapatkan data terbaru tentang PBB P2 Kota Magelang

10. Pemungutan PBB P2 menggunakan internet banking yang terhubung dengan printer portabel guna melayani pembayaran pajak kepada masyarakat, sehingga wajib pajak yang melakukan pembayaran akan langsung mendapatkan struk pembayaran yang sah saat itu juga
11. Penerapan aplikasi SP2D online yang akan mempermudah bendahara dan pihak-pihak terkait untuk melihat proses pencairan SP2D

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif. Terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggung jawab BPKAS terdapat 10 macam pajak daerah, yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Bumi dan Bangunan
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Adapun pencapaian target kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagaimana Tabel 2.2.1 berikut:

TABEL 2.2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			2019	2020	2021	2022	2019	2020 *)	2021	2022	
1	Derajat otonomi fiskal		31,96%	33,88%	35,62%	35,62%	39,41%	48,06%	35,62%	35,62%	
2	Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat		67,45%	65,79%	63,65%	63,65%	59,32%	67,93%	63,65%	63,65%	
3	Rasio pajak daerah terhadap PAD		12,33%	12,15%	12%	12%	14,78%	10,60%	12%	12%	
4	Rasio retribusi daerah terhadap PAD		3,33%	3,10%	2,91%	2,91%	2,54%	1,34%	2,91%	2,91%	
5	Prosentase pertumbuhan PAD		12,83%	11,37%	10,21%	10,21%	9,49%	117,01%	10,21%	10,21%	
6	Penerapan ASB dalam proses penganggaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persetujuan Raperda tentang APBD		Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	25 Nopember 2019	-	Minggu I Oktober s/d 31 November	Minggu I Oktober s/d 31 November	
8	Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan		Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	18-Agt-19	-	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	
9	Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

10	Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan		5	1	1	1	1	1	1	1	
11	Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP		87%	90%	90%	90%	100%	100%	90%	90%	
12	Persetujuan Perda Pertanggungjawaban APBD		Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	28-Jun-19	27-Jul-20	Juni s/d Juli	Juni s/d Juli	
13	Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang		70%	100%	80%	80%	70%	77,61%	80%	80%	
14	Barang Milik yang didayagunakan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Magelang

Perubahan dan penyesuaian kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Magelang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab sebagai implementasi asas desentralisasi. Tuntutan adanya peningkatan kemampuan dan kebutuhan profesionalitas aparat yang memiliki kompetensi menjadi hal yang mutlak. Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

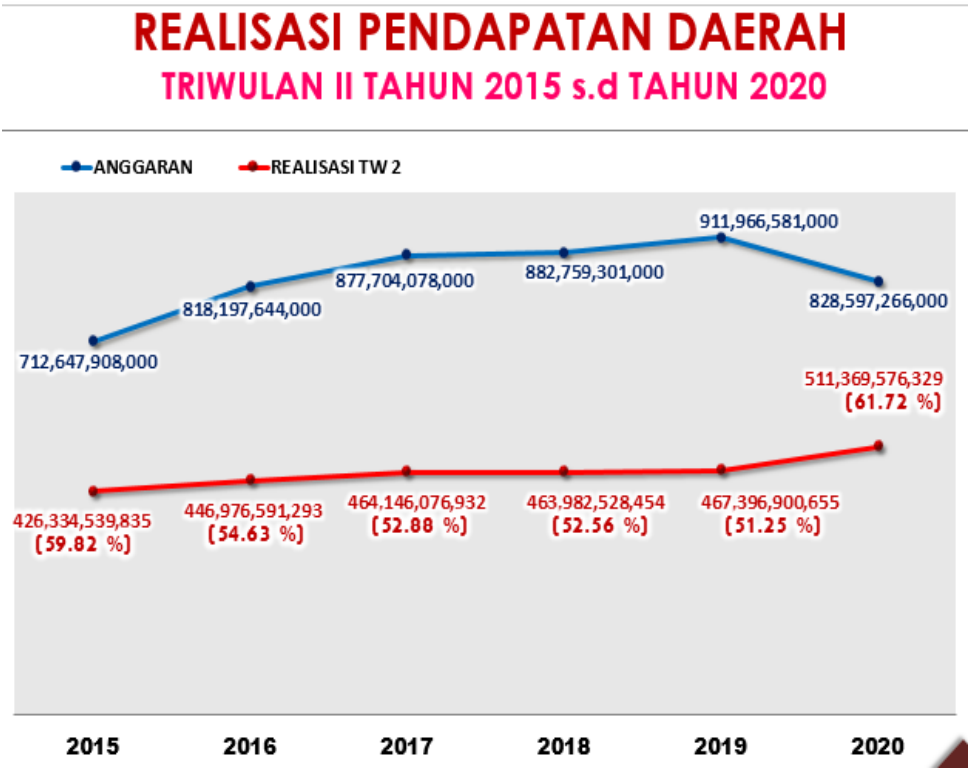
Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang memiliki tugas salah satunya yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Implementasi transaksi non tunai yang belum sepenuhnya bisa diterapkan (zero transaction).	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setiap transaksi belanja yang ada di tiap OPD.
2.	Munculnya regulasi baru dari pusat yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat perubahan cukup signifikan pada klasifikasi belanja, pendapatan dan pembiayaan.	Mempelajari, mempedomani, dan melakukan sosialisasi kepada segenap organisasi perangkat daerah serta membuat turunan peraturan terkait pengelolaan keuangan di daerah.
3.	Perubahan terhadap peruntukan/prioritas belanja berupa penggunaan Belanja Tak Terduga, refocusing dan realokasi, bahkan sampai harus dilaksanakan rasionalisasi kegiatan dan penganggaran yang diarahkan untuk segera memenuhi kebutuhan penanganan dampak pandemi COVID-19 berdampak pada penyerapan belanja daerah.	Melaksanakan akselerasi belanja daerah dengan menerbitkan Surat Edaran Percepatan Penyerapan Belanja Daerah.
4.	Belum terintegrasinya antara SIM Aset dengan SIMDA Keuangan. Hal ini terlihat dari opini WTP yang walaupun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun tetap ada catatan terkait perbaikan administrasi aset daerah.	Kontinyu dalam melakukan pembenahan pada penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang yang ada pada OPD baik melalui sosialisasi, bimbingan teknis maupun asistensi serta melakukan pengembangan pada aplikasi yang dipakai.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja pelayanan maupun pengelolaan pendapatan daerah di BPKAD Kota Magelang bisa dikatakan sudah on the track atau cukup baik. Hal ini didasarkan pada capaian realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang selalu bisa melampaui target sebesar 50%. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar diagram realisasi penerimaan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dibawah ini :

Gambar 2.3.1 Diagram Realisasi Pendapatan Daerah



Namun demikian di dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah ini agar terus berjalan baik dan meningkat tentu tidak lepas dari berbagai hambatan maupun resiko yang menyertainya. Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Kondisi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini berdampak pada penerimaan PAD dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kota Magelang.	Memberikan kemudahan layanan pembayaran pajak secara online serta melakukan inovasi-inovasi sehingga wajib pajak merasa nyaman dan dimudahkan dalam membayar pajak.
2.	Sebagian Wajib Pajak belum membayar pajak daerah sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan atau sesuai omzet (ability to pay rendah).	Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak serta melakukan monitoring baik dengan menggunakan TMD (Tax Monitoring Device) seperti penggunaan Tapping Box pada mesin kasir maupun peninjauan secara langsung agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan

		yang berlaku.
3.	Belum optimalnya sistem pajak online, yaitu dengan masih terdapatnya pajak yang terpisah antara proses perijinan dengan proses pembayarannya.	Upaya penerapan One Gate One Payment Tax dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).
4.	Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengamanan potensi pajak, sehingga sering ditemukan adanya tindakan illegal yang dapat mengurangi pemasukan PAD.	Melakukan pemetaan terhadap potensi pajak di Kota Magelang dan akan mengoptimalkan dengan dinas terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kelurahan dan kecamatan untuk dapat memaksimalkan penagihan pajak.
5.	Masih ada kesenjangan antara potensi wajib pajak pada objek pajak tertentu dengan wajib pajak yang patuh membayar pajak. Kondisi ini menyebabkan deviasi atas penerimaan pajak. Salah satu contoh, pada penerimaan pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2019 masih terdapat 23.24% wajib pajak yang memiliki objek pajak yang belum patuh untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.	Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti OPD terkait untuk memantau potensi pajak serta bekerjasama dengan pihak terkait seperti Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

3. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Guna mewujudkan tertib administrasi dan juga pemanfaatan Barang Milik Daerah juga diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang berupa hambatan/resiko beserta langkah antisipatifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Resiko/Hambatan	Langkah Antisipatif
1.	Belum optimalnya pemahaman pengelolaan asset maupun barang milik daerah yang terdapat di OPD-OPD.	Melakukan pembinaan, rekonsiliasi, dan asistensi secara kontinyu kepada Pengurus Barang di OPD-OPD.
2.	Belum optimalnya Sistem Pengelolaan BMD secara online.	Melakukan pengembangan terhadap aplikasi pengelolaan BMD (SIM ASET) yang ada

		khususnya sistem Informasi Persediaan Barang.
3.	Kurang optimalnya pengadministrasian dan pemanfaatan asset milik Pemerintah Kota Magelang. Hal ini terlihat dari opini WTP yang walaupun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun tetap ada catatan terkait perbaikan administrasi asset daerah.	Melakukan pengamanan terhadap asset daerah sehingga asset daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD adalah salah satu acuan bagi setiap perangkat daerah dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah. Oleh karenanya rancangan awal RKPD seyogyanya diketahui secara umum oleh seluruh OPD untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan OPD terkini.

2.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kebijakan pendapatan daerah merupakan upaya pencapaian pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan daerah difokuskan untuk memberdayakan potensi daerah melalui:

1. Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Untuk merespon Pasca Pandemi COVID-19, dengan ancaman penurunan PAD Tahun 2021, maka strategi yang akan di tempuh pada tahun 2021, antara lain:
 - a. Review Perda Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menyesuaikan tarif retribusi;
 - b. Asumsi dana transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021 menerapkan kebijakan kehati-hatian (prudent), yang ditandai dengan trend fiscal tightening (pengetatan kebijakan fiskal) mempedomani kebijakan APBN.
3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalu one map policy untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (Fiscal Cadaster Policy);

5. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
6. Penegakan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
7. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
8. Peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (tax evasion);
9. Perubahan regulasi yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
10. Koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;
11. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang kemudian mereview rancangan awal RKPD yang disandingkan dengan kebutuhan OPD dengan hasil bahwa program dan kegiatan yang terdapat dalam Perubahan Renja BPKAD Kota Magelang sudah tercantum semua dalam rancangan awal RKPD Kota Magelang Tahun 2021 sesuai tabel sebagai berikut :

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Magelang

OPD : BPKAD Kota Magelang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan oleh OPD					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				32.508.886.000,00	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				32.508.886.000,00	
	Kuangan				32.508.886.000,00	Kuangan				32.508.886.000,00	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)	100	5.878.195.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)	100	5.878.195.000,00	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah surat masuk dan surat keluar OPD (Jenis)	2 Jenis	750.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah surat masuk dan surat keluar OPD (Jenis)	2 Jenis	750.000,00	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jasa rekening telepon, air, listrik, dan internet untuk kelancaran tugas (Jenis)	5 Jenis	365.124.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jasa rekening telepon, air, listrik, dan internet untuk kelancaran tugas (Jenis)	5 Jenis	365.124.000,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional. (unit)	49 unit	23.690.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional. (unit)	49 unit	23.690.000,00	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jasa tenaga administrasi keuangan (orang)	40 orang	106.269.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jasa tenaga administrasi keuangan (orang)	40 orang	106.269.000,00	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya jasa dan peralatan (jenis)	22 Jenis	41.711.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tersedianya jasa dan peralatan (jenis)	22 Jenis	41.711.000,00	
	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Pengelola Keuangan dan	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	48 Jenis	16.515.000,00	Penyediaan alat tulis kantor	Badan Pengelola Keuangan dan	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	48 Jenis	16.515.000,00	

		Aset Daerah					Aset Daerah				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis)</i>	15 Jenis	13.530.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis)</i>	15 Jenis	13.530.000,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tersedianya peralatan penerangan gedung (jenis)</i>	17 Jenis	6.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tersedianya peralatan penerangan gedung (jenis)</i>	17 Jenis	6.000.000,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)</i>	3 surat kabar	5.400.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)</i>	3 surat kabar	5.400.000,00	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tersedianya logistik untuk genset dan tabung gas (jenis)</i>	2 Jenis	3.200.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tersedianya logistik untuk genset dan tabung gas (jenis)</i>	2 Jenis	3.200.000,00	
	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tersedianya makanan dan minuman (karyawan)</i>	80 karyawan	70.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tersedianya makanan dan minuman (karyawan)</i>	80 karyawan	70.000.000,00	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Koordinasi antar daerah (kegiatan)</i>	76 kegiatan	102.900.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Koordinasi antar daerah (kegiatan)</i>	76 kegiatan	102.900.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun anggaran (Bulan)</i>	14 Bulan	5.123.106.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun anggaran (Bulan)</i>	14 Bulan	5.123.106.000,00	
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	484.256.000,00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (%)</i>	100	484.256.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Gedung kantor milik OPD yang terpelihara (Unit)</i>	1 Unit	175.730.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Gedung kantor milik OPD yang terpelihara (Unit)</i>	1 Unit	175.730.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kendaraan dinas terpelihara (Unit)</i>	49 Unit	167.146.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kendaraan dinas terpelihara (Unit)</i>	49 Unit	167.146.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Perlengkapan gedung yang terpelihara (Jenis)</i>	7 Jenis	10.500.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Perlengkapan gedung yang terpelihara (Jenis)</i>	7 Jenis	10.500.000,00	

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (Jenis)	7 Jenis	130.880.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (Jenis)	7 Jenis	130.880.000,00	
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)	100	62.156.000,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)	100	62.156.000,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan capaian kinerja OPD (laporan)	12 laporan	12.987.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan capaian kinerja OPD (laporan)	12 laporan	12.987.000,00	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester (jenis laporan)	2 jenis laporan	10.013.000,00	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester (jenis laporan)	2 jenis laporan	10.013.000,00	
	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Renja penetapan dan renja perubahan (jenis dokumen)	2 jenis dokumen	1.935.000,00	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Renja penetapan dan renja perubahan (jenis dokumen)	2 jenis dokumen	1.935.000,00	
	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RKA dan RKA Perubahan (dokumen)	2 dokumen	11.690.000,00	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RKA dan RKA Perubahan (dokumen)	2 dokumen	11.690.000,00	
	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Renstra OPD (Dokumen)	1dokumen	3.651.000,00	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen Renstra OPD (Dokumen)	1dokumen	3.651.000,00	
	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah SPJ SKPD dan SKPKD yang diverifikasi (Berkas)	1.500	19.987.000,00	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah SPJ SKPD dan SKPKD yang diverifikasi (Berkas)	1.500	19.987.000,00	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	laporan akuntabilitas kinerja SKPD (dokumen)	1 dokumen	1.893.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	laporan akuntabilitas kinerja SKPD (dokumen)	1 dokumen	1.893.000,00	
	Penyusunan Renstra dan Renja PD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan OPD (Dokumen)	3 dokumen	-	Penyusunan Renstra dan Renja PD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan OPD (Dokumen)	3 dokumen	-	
4.	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel (%)	100	7.506.770.000,00	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel (%)	100	7.506.770.000,00	

	Penyusunan standar satuan harga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen Standarisasi Harga dan Biaya Tahun 2022 (Dokumen)</i>	2 dokumen	44.000.000,00	Penyusunan standar satuan harga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen Standarisasi Harga dan Biaya Tahun 2022 (Dokumen)</i>	2 dokumen	44.000.000,00	
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	1 dokumen	26.530.000,00	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	1 dokumen	26.530.000,00	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>rancangan perda tentang APBD (raperda)</i>	1 raperda	72.433.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>rancangan perda tentang APBD (raperda)</i>	1 raperda	72.433.000,00	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rancangan I, Rancangan II, dan Naskah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD (dokumen)</i>	3 dokumen	65.000.000,00	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rancangan I, Rancangan II, dan Naskah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD (dokumen)</i>	3 dokumen	65.000.000,00	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (raperda)</i>	1 raperda	50.354.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (raperda)</i>	1 raperda	50.354.000,00	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD</i>	2 raperwal	70.500.000,00	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD</i>	2 raperwal	70.500.000,00	
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Raperda tentang pertanggungjawaban APBD (raperda)</i>	1 raperda	63.912.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Raperda tentang pertanggungjawaban APBD (raperda)</i>	1 raperda	63.912.000,00	
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban APBD (raperwal)</i>	1 raperwal	35.464.000,00	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban APBD (raperwal)</i>	1 raperwal	35.464.000,00	

	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi (aplikasi)</i>	<i>1 aplikasi</i>	29.193.000,00	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi (aplikasi)</i>	<i>1 aplikasi</i>	29.193.000,00	
	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Posisi Kas Daerah Setiap Bulan (laporan)</i>	<i>12 laporan</i>	1.055.000,00	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Posisi Kas Daerah Setiap Bulan (laporan)</i>	<i>12 laporan</i>	1.055.000,00	
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen rancangan KUA 2021 dan dokumen KUA 2021 (dokumen)</i>	<i>2 dokumen</i>	27.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen rancangan KUA 2021 dan dokumen KUA 2021 (dokumen)</i>	<i>2 dokumen</i>	27.000.000,00	
	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen rancangan PPAS Tahun 2021 dan Dokumen PPAS 2021 (dokumen)</i>	<i>2 dokumen</i>	20.647.000,00	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen rancangan PPAS Tahun 2021 dan Dokumen PPAS 2021 (dokumen)</i>	<i>2 dokumen</i>	20.647.000,00	
	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen Rancangan Perubahan KUA Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan KUA Tahun 2020 (dokumen)</i>	<i>2 dokumen</i>	26.309.000,00	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen Rancangan Perubahan KUA Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan KUA Tahun 2020 (dokumen)</i>	<i>2 dokumen</i>	26.309.000,00	
	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>dokumen Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan PPAS 2020 (dokumen)</i>	<i>2 dokumen</i>	20.000.000,00	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>dokumen Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan PPAS 2020 (dokumen)</i>	<i>2 dokumen</i>	20.000.000,00	
	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>DPA SKPD yang diteliti (OPD)</i>	<i>29 OPD</i>	24.874.000,00	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>DPA SKPD yang diteliti (OPD)</i>	<i>29 OPD</i>	24.874.000,00	
	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPP, Laporan Sertifikasi, dan Laporan Rekonsiliasi SKPD (laporan)</i>	<i>12 laporan</i>	40.063.000,00	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPP, Laporan Sertifikasi, dan Laporan Rekonsiliasi SKPD (laporan)</i>	<i>12 laporan</i>	40.063.000,00	
	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang Sesuai dengan Ketentuan (SP2D SKPD yang Teregistrasi) (SP2D)</i>	<i>5000 SP2D</i>	33.704.000,00	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang Sesuai dengan Ketentuan (SP2D SKPD yang Teregistrasi) (SP2D)</i>	<i>5000 SP2D</i>	33.704.000,00	

	Pengesahan dan penerbitan SPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan penerbitan Surat Pengesahan Dana (SPD) (kegiatan)	9 Kegiatan	4.813.000,00	Pengesahan dan penerbitan SPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kegiatan penerbitan Surat Pengesahan Dana (SPD) (kegiatan)	9 Kegiatan	4.813.000,00	
	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan (dokumen)	720 dokumen	31.256.000,00	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan (dokumen)	720 dokumen	31.256.000,00	
	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan keuangan OPD yang diteliti dan diasistensi (laporan)	720 laporan	25.109.000,00	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan keuangan OPD yang diteliti dan diasistensi (laporan)	720 laporan	25.109.000,00	
	Penyusunan laporan pajak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah laporan pajak bulanan (laporan)	12 laporan	37.841.000,00	Penyusunan laporan pajak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah laporan pajak bulanan (laporan)	12 laporan	37.841.000,00	
	Penyusunan anggaran kas	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Penetapan Anggaran Kas (kegiatan)	9 Kegiatan	4.692.000,00	Penyusunan anggaran kas	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Penetapan Anggaran Kas (kegiatan)	9 Kegiatan	4.692.000,00	
	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	DPPA SKPD yang diteliti (OPD)	29 OPD	4.677.000,00	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	DPPA SKPD yang diteliti (OPD)	29 OPD	4.677.000,00	
	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Penatausahaan Permohonan Bantuan dan Tak Terduga (Berkas)	1031 Berkas	14.205.000,00	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Penatausahaan Permohonan Bantuan dan Tak Terduga (Berkas)	1031 Berkas	14.205.000,00	
	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (laporan)	12 laporan	4.926.000,00	Pengelolaan dan pengkoordinasian data- data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (laporan)	12 laporan	4.926.000,00	
	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina.jumlah sistem informasi keuangan sekolah (sekolah)	74 sekolah	51.657.000,00	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina.jumlah sistem informasi keuangan sekolah (sekolah)	74 sekolah	51.657.000,00	

	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah bendahara dan PPK yang dibina(orang)	120 orang	18.687.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah bendahara dan PPK yang dibina(orang)	120 orang	18.687.000,00	
	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan (SP2D)	1100 SP2D	11.036.000,00	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan (SP2D)	1100 SP2D	11.036.000,00	
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran (dokumen)	1 dokumen	16.794.000,00	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran (dokumen)	1 dokumen	16.794.000,00	
	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Sesuai Kebutuhan (Berkas)	1031 Berkas	891.000,00	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Sesuai Kebutuhan (Berkas)	1031 Berkas	891.000,00	
	Pembuatan Daftar Gaji	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Daftar Gaji OPD sebagai Dasar Penerbitan SP2D (Dokumen)	500 dokumen	34.240.000,00	Pembuatan Daftar Gaji	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Daftar Gaji OPD sebagai Dasar Penerbitan SP2D (Dokumen)	500 dokumen	34.240.000,00	
	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (kegiatan)	2 Kegiatan	39.947.000,00	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (kegiatan)	2 Kegiatan	39.947.000,00	
	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan hasil rekonsiliasi OPD (OPD)	29 OPD	11.341.000,00	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan hasil rekonsiliasi OPD (OPD)	29 OPD	11.341.000,00	
	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD (dokumen)	2 dokumen	43.620.000,00	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD (dokumen)	2 dokumen	43.620.000,00	
	Kegiatan Penunjang Urusan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan alokasi dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (%)	1%	6.500.000.000,00	Kegiatan Penunjang Urusan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pelaksanaan alokasi dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (%)	1%	6.500.000.000,00	
5.	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			1.421.667.000,00	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			1.421.667.000,00	

	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	599.310.000,00	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	599.310.000,00	
	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	9.898.000,00	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	9.898.000,00	
	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Data tunggakan wajib pajak daerah yang tersedia (Data)</i>	<i>120 Data</i>	10.810.000,00	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Data tunggakan wajib pajak daerah yang tersedia (Data)</i>	<i>120 Data</i>	10.810.000,00	
	Intensifikasi Pemungutan PBB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, Capaian Jatuh Tempo PBB (Kegiatan)</i>	<i>2 Kegiatan</i>	171.813.000,00	Intensifikasi Pemungutan PBB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, Capaian Jatuh Tempo PBB (Kegiatan)</i>	<i>2 Kegiatan</i>	171.813.000,00	
	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah pelayanan dan pemuktahiran data PBB (Pelayanan dan pemuktahiran data PBB)</i>	<i>350 Pelayanan dan pemuktahiran data PBB</i>	55.928.000,00	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah pelayanan dan pemuktahiran data PBB (Pelayanan dan pemuktahiran data PBB)</i>	<i>350 Pelayanan dan pemuktahiran data PBB</i>	55.928.000,00	
	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Penghapusan data piutang (Surat Keputusan)</i>	<i>1 SK</i>	31.425.000,00	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Penghapusan data piutang (Surat Keputusan)</i>	<i>1 SK</i>	31.425.000,00	
	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pelayanan pajak dan retribusi online (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	3.368.000,00	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pelayanan pajak dan retribusi online (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	3.368.000,00	
	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Bulanan dan Triwulanan Realisasi Pencairan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan (Laporan)</i>	<i>16 Laporan</i>	14.650.000,00	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan Bulanan dan Triwulanan Realisasi Pencairan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan (Laporan)</i>	<i>16 Laporan</i>	14.650.000,00	
	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah lokasi pendataan dan penilaian objek PBB P2 (Kelurahan)</i>	<i>17 Kelurahan</i>	17.238.000,00	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah lokasi pendataan dan penilaian objek PBB P2 (Kelurahan)</i>	<i>17 Kelurahan</i>	17.238.000,00	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah peserta sosialisasi (Wajib Pajak)</i>	<i>540 Wajib Pajak</i>	5.365.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah peserta sosialisasi (Wajib Pajak)</i>	<i>540 Wajib Pajak</i>	5.365.000,00	
	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah (Surat Keputusan)</i>	<i>30 SK</i>	337.158.000,00	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah (Surat Keputusan)</i>	<i>30 SK</i>	337.158.000,00	
	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	14.443.000,00	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	14.443.000,00	
	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah SPPT PBB yang terverifikasi dan terdistribusi (SPPT)</i>	<i>36000 SPPT</i>	53.329.000,00	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah SPPT PBB yang terverifikasi dan terdistribusi (SPPT)</i>	<i>36000 SPPT</i>	53.329.000,00	
	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	15.168.000,00	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	15.168.000,00	
	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Peta obyek PBB yang telah terdigitalisasi dan termuktahirkan dengan kondisi terupdate di lapangan (Peta)</i>	<i>1 Peta</i>	45.709.000,00	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Peta obyek PBB yang telah terdigitalisasi dan termuktahirkan dengan kondisi terupdate di lapangan (Peta)</i>	<i>1 Peta</i>	45.709.000,00	
	Implementasi Tapping Box	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan data transaksi elektronik per wajib pajak (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	9.020.000,00	Implementasi Tapping Box	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan data transaksi elektronik per wajib pajak (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	9.020.000,00	
	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pencapaian target pajak reklame dan PAT (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	27.035.000,00	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah laporan pencapaian target pajak reklame dan PAT (Laporan)</i>	<i>12 Laporan</i>	27.035.000,00	
6,	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Meningkat dan teradministrasinya pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	<i>100</i>	17.155.842.000,00	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Meningkat dan teradministrasinya pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	<i>100</i>	17.155.842.000,00	
	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Limit Barang Milik Daerah yang akan dipindahtanggankan (Kegiatan)</i>	<i>1 Kegiatan</i>	34.394.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Limit Barang Milik Daerah yang akan dipindahtanggankan (Kegiatan)</i>	<i>1 Kegiatan</i>	34.394.000,00	

	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD (Kegiatan)	4 Kegiatan	259.322.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD (Kegiatan)	4 Kegiatan	259.322.000,00	
	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah hasil penelitian penjualan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah (Kegiatan)	2 Kegiatan	6.067.000,00	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah hasil penelitian penjualan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah (Kegiatan)	2 Kegiatan	6.067.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sarana olahraga Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun. (Lapangan)	1 Lapangan	84.255.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sarana olahraga Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun. (Lapangan)	1 Lapangan	84.255.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung kantor Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun (Gedung Kantor)	5 Gedung Kantor	230.994.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Gedung kantor Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun (Gedung Kantor)	5 Gedung Kantor	230.994.000,00	
	Penghapusan Asset	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah pekerjaan penghapusan aset yang sudah tidak layak (paket)	2 paket	10.904.000,00	Penghapusan Asset	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah pekerjaan penghapusan aset yang sudah tidak layak (paket)	2 paket	10.904.000,00	
	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	6 Laporan	81.397.000,00	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	6 Laporan	81.397.000,00	
	Penjualan asset daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah paket Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dijual (Paket)	1 Paket	22.000.000,00	Penjualan asset daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah paket Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dijual (Paket)	1 Paket	22.000.000,00	
	Penaksiran barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kegiatan penaksiran Barang Milik Daerah (Kegiatan)	2 Kegiatan	16.895.000,00	Penaksiran barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kegiatan penaksiran Barang Milik Daerah (Kegiatan)	2 Kegiatan	16.895.000,00	
	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD kepada petugas pengelola BMD OPD. (Kegiatan)	4 Kegiatan	49.425.000,00	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD kepada petugas pengelola BMD OPD. (Kegiatan)	4 Kegiatan	49.425.000,00	
	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai kategori. (Kegiatan)	3 Kegiatan	37.583.000,00	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai kategori. (Kegiatan)	3 Kegiatan	37.583.000,00	

	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. (Dokumen)</i>	<i>10 dokumen</i>	41.920.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. (Dokumen)</i>	<i>10 dokumen</i>	41.920.000,00	
	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot. (Dokumen)</i>	<i>12 dokumen</i>	323.081.000,00	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot. (Dokumen)</i>	<i>12 dokumen</i>	323.081.000,00	
	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan data tanah milik Pemerintah (Laporan)</i>	<i>2 Laporan</i>	181.212.000,00	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Laporan data tanah milik Pemerintah (Laporan)</i>	<i>2 Laporan</i>	181.212.000,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Perpanjangan 10 STNK kendaraan dan KIR 5 bus (Unit)</i>	<i>10 Unit</i>	20.200.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Perpanjangan 10 STNK kendaraan dan KIR 5 bus (Unit)</i>	<i>10 Unit</i>	20.200.000,00	
	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah pembayaran PBB untuk gedung kantor/Rumdin/Mess. (SPPT)</i>	<i>20 SPPT</i>	28.500.000,00	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah pembayaran PBB untuk gedung kantor/Rumdin/Mess. (SPPT)</i>	<i>20 SPPT</i>	28.500.000,00	
	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah pembayaran PBB tanah milik Pemda (Bidang)</i>	<i>123 Bidang</i>	36.900.000,00	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah pembayaran PBB tanah milik Pemda (Bidang)</i>	<i>123 Bidang</i>	36.900.000,00	
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Data BMD yang mutakhir. (Kegiatan)</i>	<i>1 Kegiatan</i>	63.740.000,00	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Data BMD yang mutakhir. (Kegiatan)</i>	<i>1 Kegiatan</i>	63.740.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rumah dinas dan mess yang terpelihara selama 1 tahun. (Bangunan)</i>	<i>5 Bangunan</i>	245.628.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Rumah dinas dan mess yang terpelihara selama 1 tahun. (Bangunan)</i>	<i>5 Bangunan</i>	245.628.000,00	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kendaraan dinas Pengelola Barang yang terpelihara. (Unit)</i>	<i>10 Unit</i>	265.834.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jumlah kendaraan dinas Pengelola Barang yang terpelihara. (Unit)</i>	<i>10 Unit</i>	265.834.000,00	
	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jasa pengelolaan Barang Milik Daerah (Bulan)</i>	<i>12 Bulan</i>	107.105.000,00	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Jasa pengelolaan Barang Milik Daerah (Bulan)</i>	<i>12 Bulan</i>	107.105.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Perlengkapan rumah dinas/mess Pengelola Barang yang terpelihara (Jenis)</i>	<i>4 Jenis</i>	8.486.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>Perlengkapan rumah dinas/mess Pengelola Barang yang terpelihara (Jenis)</i>	<i>4 Jenis</i>	8.486.000,00	

	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah untuk bangunan tempat kerja (lokasi)	1 lokasi	15.000.000.000,00	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tanah untuk bangunan tempat kerja (lokasi)	1 lokasi	15.000.000.000,00	
					32.508.886.000,00					32.508.886.000,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Keuangan adalah *"Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Magelang untuk:

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Adapun identifikasi isu-isu strategis yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis Pelayanan OPD

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
1.	Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	Belum optimalnya sistem pajak online
2.	Tata kelola dan reformasi birokrasi	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Law enforcement belum sepenuhnya dijalankan yaitu denda pajak bagi WP yang menunggak pembayaran pajaknya
3.	Keuangan Negara	Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar tanpa Pengecualian	Belum optimalnya penggunaan instrumen Analisis Standar Biaya (ASB)

No.	Identifikasi Isu dan Masalah Strategis		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kota
			perencanaan penganggaran dalam penyusunan penganggaran
4.	Keuangan Negara	Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	Belum optimalnya pemahaman pengelola keuangan Perangkat Daerah atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Berdasarkan Renstra Perubahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021, maka tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang berikut indikator kinerjanya tersaji dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mewujudkan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Terwujudnya lingkungan kondusif yang memberikan rasa aman bagi masyarakat.	1. Derajat otonomi fiskal	21,40%	25,86%	29,82%	31,96%	33,88%	35,62%
			2. Rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana pusat	80,27%	73,66%	69,67%	67,45%	65,79%	63,65%
			3. Rasio pajak daerah terhadap PAD	13,24%	13,48%	12,56%	12,33%	12,15%	12%
			4. Ratio retribusi daerah terhadap PAD	3,12%	4,20%	6,36%	3,33%	3,1%	2,91%
			5. Prosentase pertumbuhan PAD	16,57%	18,44%	19,18%	12,83%	11,37%	10,21%
2.	Mewujudkan sistem penganggaran yang efektif dan efisien	1. Terwujudnya anggaran belanja pemerintah daerah yang berbasis kinerja	1. Penerapan ASB dalam proses penganggaran	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Terwujudnya efektifitas proses penganggaran daerah	1. Persetujuan Raperda tentang APBD	Minggu I Oktober s/d	Minggu I Oktober s/d	Minggu I Oktober s/d	Minggu I Oktober s/d	Minggu I Oktober s/d	Minggu I Oktober s/d

				31 November	31 November	31 November	31 November	31 November	31 November
			2. Persetujuan Raperda tentang APBD Perubahan	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September	Minggu II September s/d akhir September
3.	Mewujudkan penatausahaan keuangan yang efektif dan transparan	1. Terciptanya tertib administrasi pencairan dana	1. Prosentase pencairan dana belanja langsung dan tidak langsung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Terwujudnya penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Jumlah sisdur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan perkembangan ketentuan	1	1	5	5	5	5
4.	Mewujudkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	1. Terciptanya laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	1. Prosentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP	78%	81%	84%	87%	90%	90%
5.	Mewujudkan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai ketentuan	1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Aset tanah yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Magelang	60%	65%	70%	75%	80%	80%

			2. Barang Milik yang didayagunakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Pelaporan semesteran Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	50%	75 %	100%	100%	100%
			4. Pelaporan tahunan Barang Milik Daerah yang tepat waktu	50%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang bersama perangkat daerah terkait berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan berperan serta dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang modern, cerdas, sejahtera dan religius.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang merupakan program dan kegiatan yang masuk dalam empat kategori program prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun 2021. Adapun ketentuan tentang keempat program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program prioritas pertama merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau Program Unggulan Kepala Daerah, yaitu program dalam memperkuat implementasi Masterplan Smartcity.
2. Program prioritas kedua merupakan program daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021.
3. Program prioritas ketiga merupakan program daerah dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja daerah.
4. Program prioritas keempat merupakan prioritas program ditingkat OPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap OPD.

Adapun rekapitulasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 sebagaimana yang tersaji dalam RKPD Kota Magelang Tahun 2021 untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang terdiri dari 6 (enam) program dan 103 (seratus tiga) kegiatan atau berkurang 22 (dua puluh dua) kegiatan jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang tercantum RKPD Kota Magelang/Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2021 BPKAD Kota Magelang yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 akan efektif apabila ditopang dengan efektifitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Guna meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mulai berlaku untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021, sehingga dokumen Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 akan mengimplementasikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Demikian pula untuk nomenklatur di Renja 2021 mengalami perubahan sesuai Permendagri No.90 Tahun 2019 yang awalnya tujuh program yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang menjadi 4 (empat) program yang terbagi dalam 1 (satu) program yang ada di setiap perangkat daerah yaitu Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta program-program sesuai urusan yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah masing-masing sebanyak 3 (tiga) program, yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun yang kami sampaikan dalam Renja Tahun 2021 BPKAD ini merupakan program dan kegiatan yang lama sesuai dengan yang disampaikan pada RKPD Tahun 2021 Pemerintah Kota Magelang. Total pagu indikatif / kebutuhan dana dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk Tahun 2021 sebesar Rp.32.508.886.000,- dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD. Berikut disampaikan rincian keempat program tersebut:

1. Program yang ada di setiap perangkat daerah, yaitu:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 5.878.195.000,-
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 484.256.000,-
 - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, dengan total anggaran program sebesar Rp. 62.156.000,-
2. Program yang menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah sesuai urusannya, yaitu:
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.506.770.000,-
 - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 18 (delapan belas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.421.667.000;

- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.155.842.000,00

Secara lebih lengkap program dan kegiatan dimaksud tersaji dalam Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai berikut:

**Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kota Magelang**

OPD : BPKAD Kota Magelang

KODE	Program / Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2021				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	TARGET 2021	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				32.508.886.000,00				35.759.774.600,00
4.04	Keuangan				32.508.886.000,00				35.759.774.600,00
4.04.4.04.0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	5.878.195.000,00			100	6.466.014.500,00
4.04.4.04.0101.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar OPD (Jenis)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2 Jenis	750.000,00	Dana Alokasi Umum		2 Jenis	825.000,00
4.04.4.04.0101.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa rekening telepon, air, listrik, dan internet untuk kelancaran tugas (Jenis)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5 Jenis	365.124.000,00	Dana Alokasi Umum		5 Jenis	401.636.400,00
4.04.4.04.0101.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional. (unit)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	49 unit	23.690.000,00	Dana Alokasi Umum		49 unit	26.059.000,00
4.04.4.04.0101.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa tenaga administrasi keuangan (orang)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	40 orang	106.269.000,00	Dana Alokasi Umum		40 orang	116.895.900,00
4.04.4.04.0101.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa dan peralatan (jenis)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22 Jenis	41.711.000,00	Dana Alokasi Umum		22 Jenis	45.882.100,00
4.04.4.04.0101.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (jenis)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	48 Jenis	16.515.000,00	Dana Alokasi Umum		48 Jenis	18.166.500,00
4.04.4.04.0101.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis)	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15 Jenis	13.530.000,00	Dana Alokasi Umum		15 Jenis	14.883.000,00

4.04.4.04.0101.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<i>Tersedianya peralatan penerangan gedung (jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>17 Jenis</i>	6.000.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>17 Jenis</i>	6.600.000,00
4.04.4.04.0101.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<i>Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>3 surat kabar</i>	5.400.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>3 surat kabar</i>	5.940.000,00
4.04.4.04.0101.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	<i>Tersedianya logistik untuk genset dan tabung gas (jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 Jenis</i>	3.200.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 Jenis</i>	3.520.000,00
4.04.4.04.0101.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	<i>Tersedianya makanan dan minuman (karyawan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>80 karyawan</i>	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>80 karyawan</i>	77.000.000,00
4.04.4.04.0101.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<i>Koordinasi antar daerah (kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>76 kegiatan</i>	102.900.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>76 kegiatan</i>	113.190.000,00
4.04.4.04.0101.01.35	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun anggaran (Bulan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>14 Bulan</i>	5.123.106.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>14 Bulan</i>	5.635.416.600,00
4.04.4.04.0101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<i>Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>100</i>	484.256.000,00			<i>100</i>	532.681.600,00
4.04.4.04.0101.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	<i>Gedung kantor milik OPD yang terpelihara (Unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 Unit</i>	175.730.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 Unit</i>	193.303.000,00
4.04.4.04.0101.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	<i>Jumlah kendaraan dinas terpelihara (Unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>49 Unit</i>	167.146.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>49 Unit</i>	183.860.600,00
4.04.4.04.0101.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	<i>Perlengkapan gedung yang terpelihara (Jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>7 Jenis</i>	10.500.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>7 Jenis</i>	11.550.000,00
4.04.4.04.0101.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (Jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>7 Jenis</i>	130.880.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>7 Jenis</i>	143.968.000,00
4.04.4.04.0101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<i>Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>100</i>	62.156.000,00			<i>100</i>	68.371.600,00
4.04.4.04.0101.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	<i>Laporan capaian kinerja OPD (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 laporan</i>	12.987.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 laporan</i>	14.285.700,00

4.04.4.04.0101.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	<i>jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester (jenis laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 jenis laporan</i>	10.013.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 jenis laporan</i>	11.014.300,00
4.04.4.04.0101.06.06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	<i>Renja penetapan dan renja perubahan (jenis dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 jenis dokumen</i>	1.935.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 jenis dokumen</i>	2.128.500,00
4.04.4.04.0101.06.08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	<i>RKA dan RKA Perubahan (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 dokumen</i>	11.690.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 dokumen</i>	12.859.000,00
4.04.4.04.0101.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	<i>Dokumen Renstra OPD (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1dokumen</i>	3.651.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1dokumen</i>	4.016.100,00
4.04.4.04.0101.06.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	<i>Jumlah SPJ SKPD dan SKPKD yang diverifikasi (Berkas)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1.500</i>	19.987.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1.500</i>	21.985.700,00
4.04.4.04.0101.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	<i>laporan akuntabilitas kinerja SKPD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 dokumen</i>	1.893.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 dokumen</i>	2.082.300,00
4.04.4.04.0101.06.30	Penyusunan Renstra dan Renja PD	<i>Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan OPD (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>3 dokumen</i>	-	Dana Alokasi Umum		<i>3 dokumen</i>	
4.04.4.04.0101.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>100</i>	7.506.770.000,00			<i>100</i>	8.257.447.000,00
4.04.4.04.0101.15.002	Penyusunan standar satuan harga	<i>Dokumen Standarisasi Harga dan Biaya Tahun 2022 (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 dokumen</i>	44.000.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 dokumen</i>	48.400.000,00
4.04.4.04.0101.15.004	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	<i>Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 dokumen</i>	26.530.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 dokumen</i>	29.183.000,00
4.04.4.04.0101.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	<i>rancangan perda tentang APBD (raperda)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 raperda</i>	72.433.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 raperda</i>	79.676.300,00
4.04.4.04.0101.15.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	<i>Rancangan I, Rancangan II, dan Naskah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>3 dokumen</i>	65.000.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>3 dokumen</i>	71.500.000,00
4.04.4.04.0101.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	<i>Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (raperda)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 raperda</i>	50.354.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 raperda</i>	55.389.400,00

4.04.4.04.0101.15.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	<i>Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2 <i>raperwal</i>	70.500.000,00	Dana Alokasi Umum		2 <i>raperwal</i>	77.550.000,00
4.04.4.04.0101.15.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	<i>Raperda tentang pertanggungjawaban APBD (raperda)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1 <i>raperda</i>	63.912.000,00	Dana Alokasi Umum		1 <i>raperda</i>	70.303.200,00
4.04.4.04.0101.15.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	<i>Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban APBD (raperwal)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1 <i>raperwal</i>	35.464.000,00	Dana Alokasi Umum		1 <i>raperwal</i>	39.010.400,00
4.04.4.04.0101.15.013	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	<i>Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi (aplikasi)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1 <i>aplikasi</i>	29.193.000,00	Dana Alokasi Umum		1 <i>aplikasi</i>	32.112.300,00
4.04.4.04.0101.15.018	Penyusunan laporan posisi kas daerah	<i>Laporan Posisi Kas Daerah Setiap Bulan (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12 <i>laporan</i>	1.055.000,00	Dana Alokasi Umum		12 <i>laporan</i>	1.160.500,00
4.04.4.04.0101.15.020	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	<i>Dokumen rancangan KUA 2021 dan dokumen KUA 2021 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2 <i>dokumen</i>	27.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2 <i>dokumen</i>	29.700.000,00
4.04.4.04.0101.15.021	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	<i>Dokumen rancangan PPAS Tahun 2021 dan Dokumen PPAS 2021 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2 <i>dokumen</i>	20.647.000,00	Dana Alokasi Umum		2 <i>dokumen</i>	22.711.700,00
4.04.4.04.0101.15.022	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	<i>Dokumen Rancangan Perubahan KUA Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan KUA Tahun 2020 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2 <i>dokumen</i>	26.309.000,00	Dana Alokasi Umum		2 <i>dokumen</i>	28.939.900,00
4.04.4.04.0101.15.023	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	<i>dokumen Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan PPAS 2020 (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2 <i>dokumen</i>	20.000.000,00	Dana Alokasi Umum		2 <i>dokumen</i>	22.000.000,00
4.04.4.04.0101.15.024	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD	<i>DPA SKPD yang diteliti (OPD)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29 <i>OPD</i>	24.874.000,00	Dana Alokasi Umum		29 <i>OPD</i>	27.361.400,00
4.04.4.04.0101.15.027	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	<i>Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPP, Laporan Sertifikasi, dan Laporan Rekonsiliasi SKPD (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12 <i>laporan</i>	40.063.000,00	Dana Alokasi Umum		12 <i>laporan</i>	44.069.300,00

4.04.4.04.0101.15.030	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	<i>Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang Sesuai dengan Ketentuan (SP2D SKPD yang Teregistrasi) (SP2D)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5000 SP2D	33.704.000,00	Dana Alokasi Umum		5000 SP2D	37.074.400,00
4.04.4.04.0101.15.032	Pengesahan dan penerbitan SPD	<i>Kegiatan penerbitan Surat Pengesahan Dana (SPD) (kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9 Kegiatan	4.813.000,00	Dana Alokasi Umum		9 Kegiatan	5.294.300,00
4.04.4.04.0101.15.036	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	720 dokumen	31.256.000,00	Dana Alokasi Umum		720 dokumen	34.381.600,00
4.04.4.04.0101.15.042	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD	<i>Laporan keuangan OPD yang diteliti dan diasistensi (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	720 laporan	25.109.000,00	Dana Alokasi Umum		720 laporan	27.619.900,00
4.04.4.04.0101.15.048	Penyusunan laporan pajak	<i>Jumlah laporan pajak bulanan (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12 laporan	37.841.000,00	Dana Alokasi Umum		12 laporan	41.625.100,00
4.04.4.04.0101.15.051	Penyusunan anggaran kas	<i>Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Penetapan Anggaran Kas (kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9 Kegiatan	4.692.000,00	Dana Alokasi Umum		9 Kegiatan	5.161.200,00
4.04.4.04.0101.15.052	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD	<i>DPPA SKPD yang diteliti (OPD)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29 OPD	4.677.000,00	Dana Alokasi Umum		29 OPD	5.144.700,00
4.04.4.04.0101.15.057	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	<i>Jumlah Penatausahaan Permohonan Bantuan dan Tak Terduga (Berkas)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1031 Berkas	14.205.000,00	Dana Alokasi Umum		1031 Berkas	15.625.500,00
4.04.4.04.0101.15.060	Pengelolaan dan pengkoordinasian data- data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	<i>Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12 laporan	4.926.000,00	Dana Alokasi Umum		12 laporan	5.418.600,00
4.04.4.04.0101.15.065	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah	<i>Jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina.jumlah sistem informasi keuangan sekolah (sekolah)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	74 sekolah	51.657.000,00	Dana Alokasi Umum		74 sekolah	56.822.700,00
4.04.4.04.0101.15.072	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Jumlah bendahara dan PPK yang dibina(orang)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120 orang	18.687.000,00	Dana Alokasi Umum		120 orang	20.555.700,00
4.04.4.04.0101.15.077	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD	<i>Jumlah SP2D yang diterbitkan (SP2D)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1100 SP2D	11.036.000,00	Dana Alokasi Umum		1100 SP2D	12.139.600,00

4.04.4.04.0101.15.081	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	<i>Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 dokumen</i>	16.794.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 dokumen</i>	18.473.400,00
4.04.4.04.0101.15.091	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	<i>Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Sesuai Kebutuhan (Berkas)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1031 Berkas</i>	891.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1031 Berkas</i>	980.100,00
4.04.4.04.0101.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	<i>Daftar Gaji OPD sebagai Dasar Penerbitan SP2D (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>500 dokumen</i>	34.240.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>500 dokumen</i>	37.664.000,00
4.04.4.04.0101.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 Kegiatan</i>	39.947.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 Kegiatan</i>	43.941.700,00
4.04.4.04.0101.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	<i>Laporan hasil rekonsiliasi OPD (OPD)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>29 OPD</i>	11.341.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>29 OPD</i>	12.475.100,00
4.04.4.04.0101.15.137	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD (dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 dokumen</i>	43.620.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 dokumen</i>	47.982.000,00
4.04.4.04.0101.15.140	Kegiatan Penunjang Urusan	<i>Pelaksanaan alokasi dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1%</i>	6.500.000.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1%</i>	7.150.000.000,00
4.04.4.04.0101.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		1.421.667.000,00				1.563.833.700,00
4.04.4.04.0101.18.001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	<i>Laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 Laporan</i>	599.310.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 Laporan</i>	659.241.000,00
4.04.4.04.0101.18.004	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	<i>Laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing- masing jenis pajak (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 Laporan</i>	9.898.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 Laporan</i>	10.887.800,00
4.04.4.04.0101.18.005	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	<i>Data tunggakan wajib pajak daerah yang tersedia (Data)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>120 Data</i>	10.810.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>120 Data</i>	11.891.000,00
4.04.4.04.0101.18.006	Intensifikasi Pemungutan PBB	<i>PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, Capaian Jatuh Tempo PBB (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 Kegiatan</i>	171.813.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 Kegiatan</i>	188.994.300,00

4.04.4.04.0101.18.009	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	<i>Jumlah pelayanan dan pemuktahiran data PBB (Pelayanan dan pemutakhiran data PBB)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>350 Pelayanan dan pemutakhiran data PBB</i>	55.928.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>350 Pelayanan dan pemutakhiran data PBB</i>	61.520.800,00
4.04.4.04.0101.18.011	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	<i>Penghapusan data piutang (Surat Keputusan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 SK</i>	31.425.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 SK</i>	34.567.500,00
4.04.4.04.0101.18.012	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah	<i>Jumlah laporan pelayanan pajak dan retribusi online (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 Laporan</i>	3.368.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 Laporan</i>	3.704.800,00
4.04.4.04.0101.18.014	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	<i>Laporan Bulanan dan Triwulanan Realisasi Pencairan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>16 Laporan</i>	14.650.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>16 Laporan</i>	16.115.000,00
4.04.4.04.0101.18.015	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	<i>Jumlah lokasi pendataan dan penilaian objek PBB P2 (Kelurahan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>17 Kelurahan</i>	17.238.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>17 Kelurahan</i>	18.961.800,00
4.04.4.04.0101.18.016	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan tentang Pendapatan Daerah	<i>Jumlah peserta sosialisasi (Wajib Pajak)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>540 Wajib Pajak</i>	5.365.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>540 Wajib Pajak</i>	5.901.500,00
4.04.4.04.0101.18.017	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	<i>Jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah (Surat Keputusan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>30 SK</i>	337.158.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>30 SK</i>	370.873.800,00
4.04.4.04.0101.18.024	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	<i>Laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 Laporan</i>	14.443.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 Laporan</i>	15.887.300,00
4.04.4.04.0101.18.026	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	<i>Jumlah SPPT PBB yang terverifikasi dan terdistribusi (SPPT)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>36000 SPPT</i>	53.329.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>36000 SPPT</i>	58.661.900,00
4.04.4.04.0101.18.027	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 Laporan</i>	15.168.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 Laporan</i>	16.684.800,00
4.04.4.04.0101.18.029	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	<i>Peta obyek PBB yang telah terdigitalisasi dan termuktahirkan dengan kondisi terupdate di lapangan (Peta)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 Peta</i>	45.709.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 Peta</i>	50.279.900,00
4.04.4.04.0101.18.030	Implementasi Tapping Box	<i>Jumlah laporan data transaksi elektronik per wajib pajak (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 Laporan</i>	9.020.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 Laporan</i>	9.922.000,00

4.04.4.04.0101.18.031	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	<i>Jumlah laporan pencapaian target pajak reklame dan PAT (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 Laporan</i>	27.035.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 Laporan</i>	29.738.500,00
4.04.4.04.0101.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Meningkat dan teradministrasinya pengelolaan Barang Milik Daerah (%)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100	17.155.842.000,00			100	18.871.426.200,00
4.04.4.04.0101.19.001	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	<i>Limit Barang Milik Daerah yang akan dipindahtanggankan (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 Kegiatan</i>	34.394.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 Kegiatan</i>	37.833.400,00
4.04.4.04.0101.19.002	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	<i>Hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>4 Kegiatan</i>	259.322.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>4 Kegiatan</i>	285.254.200,00
4.04.4.04.0101.19.004	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah hasil penelitian penjualan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 Kegiatan</i>	6.067.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 Kegiatan</i>	6.673.700,00
4.04.4.04.0101.19.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	<i>Sarana olahraga Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun. (Lapangan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 Lapangan</i>	84.255.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 Lapangan</i>	92.680.500,00
4.04.4.04.0101.19.008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<i>Gedung kantor Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun (Gedung Kantor)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>5 Gedung Kantor</i>	230.994.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>5 Gedung Kantor</i>	254.093.400,00
4.04.4.04.0101.19.012	Penghapusan Asset	<i>Jumlah pekerjaan penghapusan aset yang sudah tidak layak (paket)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 paket</i>	10.904.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 paket</i>	11.994.400,00
4.04.4.04.0101.19.014	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	<i>Jumlah laporan Barang Milik Daerah (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>6 Laporan</i>	81.397.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>6 Laporan</i>	89.536.700,00
4.04.4.04.0101.19.015	Penjualan asset daerah	<i>Jumlah paket Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dijual (Paket)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 Paket</i>	22.000.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 Paket</i>	24.200.000,00
4.04.4.04.0101.19.017	Penaksiran barang milik daerah	<i>Jumlah kegiatan penaksiran Barang Milik Daerah (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 Kegiatan</i>	16.895.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 Kegiatan</i>	18.584.500,00
4.04.4.04.0101.19.018	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	<i>Jumlah pembinaan pengelolaan BMD kepada petugas pengelola BMD OPD. (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>4 Kegiatan</i>	49.425.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>4 Kegiatan</i>	54.367.500,00
4.04.4.04.0101.19.019	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah kegiatan optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai kategori. (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>3 Kegiatan</i>	37.583.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>3 Kegiatan</i>	41.341.300,00
4.04.4.04.0101.19.020	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	<i>Jumlah Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>10 dokumen</i>	41.920.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>10 dokumen</i>	46.112.000,00

4.04.4.04.0101.19.023	Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	<i>Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot. (Dokumen)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 dokumen</i>	323.081.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 dokumen</i>	355.389.100,00
4.04.4.04.0101.19.024	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	<i>Laporan data tanah milik Pemerintah (Laporan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>2 Laporan</i>	181.212.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>2 Laporan</i>	199.333.200,00
4.04.4.04.0101.19.026	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	<i>Perpanjangan 10 STNK kendaraan dan KIR 5 bus (Unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>10 Unit</i>	20.200.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>10 Unit</i>	22.220.000,00
4.04.4.04.0101.19.027	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	<i>Jumlah pembayaran PBB untuk gedung kantor/Rumdin/Mess. (SPPT)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>20 SPPT</i>	28.500.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>20 SPPT</i>	31.350.000,00
4.04.4.04.0101.19.028	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pemda	<i>Jumlah pembayaran PBB tanah milik Pemda (Bidang)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>123 Bidang</i>	36.900.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>123 Bidang</i>	40.590.000,00
4.04.4.04.0101.19.029	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	<i>Data BMD yang mutakhir. (Kegiatan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 Kegiatan</i>	63.740.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 Kegiatan</i>	70.114.000,00
4.04.4.04.0101.19.030	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	<i>Rumah dinas dan mess yang terpelihara selama 1 tahun. (Bangunan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>5 Bangunan</i>	245.628.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>5 Bangunan</i>	270.190.800,00
4.04.4.04.0101.19.031	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	<i>Jumlah kendaraan dinas Pengelola Barang yang terpelihara. (Unit)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>10 Unit</i>	265.834.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>10 Unit</i>	292.417.400,00
4.04.4.04.0101.19.034	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Jasa pengelolaan Barang Milik Daerah (Bulan)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>12 Bulan</i>	107.105.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>12 Bulan</i>	117.815.500,00
4.04.4.04.0101.19.044	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	<i>Perlengkapan rumah dinas/mess Pengelola Barang yang terpelihara (Jenis)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>4 Jenis</i>	8.486.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>4 Jenis</i>	9.334.600,00
4.04.4.04.0101.19.046	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	<i>Tanah untuk bangunan tempat kerja (lokasi)</i>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>1 lokasi</i>	15.000.000.000,00	Dana Alokasi Umum		<i>1 lokasi</i>	16.500.000.000,00
					32.508.886.000,00				35.759.774.600,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang tahun 2021 dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2021**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2019	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2021	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						32.508.886.000,00							0,00	
	4.04	Keuangan						32.508.886.000,00							0,00	
1.	4.04.4.04.0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)</i>				100	5.878.195.000,00			Tidak	Tidak			0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	<i>Jumlah surat masuk dan surat keluar OPD (Jenis)</i>				2	750.000,00 750.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Jasa rekening telepon, air, listrik, dan internet untuk kelancaran tugas. (Jenis)</i>				5	365.124.000,00 365.124.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<i>Perpanjangan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional. (unit)</i>				49	23.690.000,00 23.690.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	<i>jasa tenaga administrasi keuangan (orang)</i>				40	106.269.000,00 106.269.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	<i>Tersedianya jasa dan peralatan (jenis)</i>				22	41.711.000,00 41.711.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.10	Penyediaan alat tulis kantor						16.515.000,00			Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

			Tersedianya alat tulis kantor (jenis)				48	16.515.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)							
	4.04.4.04.0101.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (jenis)				15	13.530.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan penerangan gedung (jenis)				17	6.000.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar)				3	5.400.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik untuk genset dan tabung gas (jenis)				2	3.200.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman (karyawan)				80	70.000.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi antar daerah (kegiatan)				76	102.900.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

	4.04.4.04.0101.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tercukupinya sarana dan prasarana kantor (%)				100	484.256.000,00			Tidak	Tidak			0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor milik OPD yang terpelihara (Unit)				1	175.730.000,00 175.730.000,00	(BPKAD, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara (Unit)				49	167.146.000,00 167.146.000,00	(BPKAD, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung yang terpelihara (Jenis)				7	10.500.000,00 10.500.000,00	(BPKAD, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (Jenis)				7	130.880.000,00 130.880.000,00	(BPKAD, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.	4.04.4.04.0101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terselenggaranya kegiatan perkantoran (%)				100	62.156.000,00			Tidak	Tidak			0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Laporan capaian kinerja OPD (laporan)				12	12.987.000,00 12.987.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	jumlah laporan realisasi keuangan kegiatan per semester (jenis laporan)				2	10.013.000,00 10.013.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.06.05	Penyusunan Rencana Kerja OPD	Renja penetapan dan renja perubahan (jenis dokumen)				2	1.935.000,00 1.935.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.06.08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	RKA dan RKA Perubahan (dokumen)				2	11.690.000,00 11.690.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.06.10	Penyusunan Rencana Strategis OPD	Dokumen Renstra OPD (Dokumen)				1	3.651.000,00 3.651.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.06.20	Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ SKPD dan SKPKD yang diverifikasi (Berkas)				1.500	19.987.000,00 19.987.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.06.27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	laporan akuntabilitas kinerja SKPD (dokumen)				1	1.893.000,00 1.893.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.06.30	Penyusunan Renstra dan Renja PD	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan OPD (Dokumen)				3		(, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.	4.04.4.04.0101.15	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah						7.506.770.000,00			Tidak	Tidak			0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

			Terciptanya pengelolaan keuangan yang akuntabel (%)				100										
4.04.4.04.0101.15.002	Penyusunan standar satuan harga	Dokumen Standarisasi Harga dan Biaya Tahun 2022 (dokumen)				2	44.000.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.004	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (dokumen)				1	26.530.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	rancangan perda tentang APBD (raperda)				1	72.433.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Rancangan I, Rancangan II, dan Naskah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD (dokumen)				3	65.000.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (raperda)				1	50.354.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD				2	70.500.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda tentang pertanggungjawaban APBD (raperda)				1	63.912.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Walikota tentang pertanggungjawaban APBD (rapenwal)				1	35.464.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.013	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang terintegrasi (aplikasi)				1	29.193.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.018	Penyusunan laporan posisi kas daerah	Laporan Posisi Kas Daerah Setiap Bulan (laporan)				12	1.055.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.020	Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen rancangan KUA 2021 dan dokumen KUA 2021 (dokumen)				2	27.000.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.021	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen rancangan PPAS Tahun 2021 dan Dokumen PPAS 2021 (dokumen)				2	20.647.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.022	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen Rancangan Perubahan KUA Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan KUA Tahun 2020 (dokumen)				2	26.309.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.023	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara						20.000.000,00			Tidak	Tidak						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

			dokumen Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2020 dan Dokumen Perubahan PPAS 2020 (dokumen)				2	20.000.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)							
4.04.4.04.0101.15.024	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD		DPA SKPD yang diteliti (OPD)				29	24.874.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.027	Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak		Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, SKPP, Laporan Sertifikasi, dan Laporan Rekonsiliasi SKPD (laporan)				12	40.063.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.030	Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek		Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang Sesuai dengan Ketentuan (SP2D SKPD yang Teregistrasi) (SP2D)				5.000	33.704.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.032	Pengesahan dan penerbitan SPD		Kegiatan penerbitan Surat Pengesahan Dana (SPD) (kegiatan)				9	4.813.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.036	Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan		Jumlah dokumen laporan keuangan konsolidasi bulanan (dokumen)				720	31.256.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.042	Penelitian dan Asistensi Laporan Keuangan OPD		Laporan keuangan OPD yang diteliti dan diasistensi (laporan)				720	25.109.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.048	Penyusunan laporan pajak		Jumlah laporan pajak bulanan (laporan)				12	37.841.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.051	Penyusunan anggaran kas		Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Penetapan Anggaran Kas (kegiatan)				9	4.692.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.052	Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD		DPPA SKPD yang diteliti (OPD)				29	4.677.000,00	(4.677.000, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.057	Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga		Jumlah Penatausahaan Permohonan Bantuan dan Tak Terduga (Berkas)				1.031	14.205.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.060	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (laporan)				12	4.926.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.065	Penyusunan dan pembinaan pengelolaan keuangan sekolah		Jumlah bendahara dan operator sekolah yang dibina, jumlah sistem informasi keuangan sekolah (sekolah)				74	51.657.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.072	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah bendahara dan PPK yang dibina (orang)				120	18.687.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)			Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.15.077	Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D OPD							11.036.000,00				Tidak	Tidak			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

			Jumlah SP2D yang diterbitkan (SP2D)				1.100	11.036.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)							
	4.04.4.04.0101.15.081	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tingkat Kota	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran (dokumen)				1	16.794.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.15.091	Kegiatan pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial Sesuai Kebutuhan (Berkas)				1.031	891.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.15.107	Pembuatan Daftar Gaji	Daftar Gaji OPD sebagai Dasar Penerbitan SP2D (Dokumen)				500	34.240.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.15.108	Publikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	pameran hasil pengelolaan keuangan daerah (kegiatan)				2	39.947.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.15.115	Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD	Laporan hasil rekonsiliasi OPD (OPD)				29	11.341.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.15.137	Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Terlaksananya verifikasi RKA SKPD dan RKPA SKPD (dokumen)				2	43.620.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.15.140	Kegiatan Penunjang Urusan	Pelaksanaan alokasi dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (%)				100	6.500.000.000,00	(Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.	4.04.4.04.0101.18	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah						1.421.667.000,00			Tidak	Tidak			0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi (Laporan)				12	599.310.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.004	Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penatausahaan Administrasi Pendapatan Daerah	Laporan realisasi pendapatan daerah dan laporan masing-masing jenis pajak (Laporan)				12	9.898.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.005	Intensifikasi Dan Inventarisasi Data Tunggal Pajak Daerah	Data tunggalan wajib pajak daerah yang tersedia (Data)				120	10.810.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.006	Intensifikasi Pemungutan PBB	PBB panutan dan pemberian penghargaan kepada kelurahan, RW, RT dan wajib pajak, Capaian Jatuh Tempo PBB (Kegiatan)				2	171.813.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.009	Pengelolaan Data Dan Informasi PBB	Jumlah pelayanan dan pemuktahiran data PBB (Pelayanan dan pemuktahiran data PBB)				350	55.928.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.011	Verifikasi, Validasi dan Penghapusan Data Piutang PBB	Penghapusan data piutang (Surat Keputusan)				1	31.425.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.012	Penatausahaan Sistem Integrasi Pendapatan Asli Daerah						3.368.000,00			Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

			Jumlah laporan pelayanan pajak dan retribusi online (Laporan)			12	3.368.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)							
	4.04.4.04.0101.18.01.4	Penatausahaan Administrasi Dana Transfer	Laporan Bulanan dan Triwulanan Realisasi Pencairan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan (Laporan)			16	14.650.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.01.5	Penilaian objek pajak perdesaan dan perkotaan	Jumlah lokasi pendataan dan penilaian objek PBB P2 (Kelurahan)			17	17.238.000,00	(Kelurahan se-Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.01.6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pendapatan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi (Wajib Pajak)			540	5.365.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.01.7	Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	Jumlah SK pemberian pengurangan pajak daerah dan SK pembebasan pajak daerah (Surat Keputusan)			30	337.158.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.02.4	Penatausahaan Administrasi Pemungutan BPHTB	Laporan penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB (Laporan)			12	14.443.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.02.6	Verifikasi dan pendistribusian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang terverifikasi dan terdistribusi (SPPT)			36.000	53.329.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.02.7	Evaluasi Bulanan dan Triwulanan Pendapatan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi capaian target pendapatan daerah (Laporan)			12	15.168.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.02.9	Digitasi peta dan pemutakhiran data obyek pajak	Peta obyek PBB yang telah terdigitalisasi dan termutakhirkan dengan kondisi terupdate di lapangan (Peta)			1	45.709.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.03.0	Implementasi Tapping Box	Jumlah laporan data transaksi elektronik per wajib pajak (Laporan)			12	9.020.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.18.03.1	Penatausahaan Administrasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	Jumlah laporan pencapaian target pajak reklame dan PAT (Laporan)			12	27.035.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6.	4.04.4.04.0101.19	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkat dan teradministrasinya pengelolaan Barang Milik Daerah (%)			100	17.155.842.000,00			Tidak	Tidak			0,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.19.00.1	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemindahtanganan	Limit Barang Milik Daerah yang akan dipindahtanggankan (Kegiatan)			1	34.394.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.19.00.2	Penilaian Barang Milik Daerah untuk Pemanfaatan	Hasil penilaian untuk dasar pemanfaatan BMD (Kegiatan)			4	259.322.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.19.00.4	Penelitian Usulan, Penjualan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil penelitian penjualan dan/atau pemusnahan Barang Milik Daerah (Kegiatan)			2	6.067.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4.04.4.04.0101.19.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Olah Raga	Sarana olahraga Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun. (Lapangan)	1	84.255.000,00	84.255.000,00	(Lapangan tenis Armada Estate, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor Pengelola Barang yang terpelihara selama 1 tahun (Gedung Kantor)	5	230.994.000,00	230.994.000,00	(Gedung Wiworo, Gedung KONI, Gedung Alun2 Selatan, Gedung Eks BPKM, Gedung Eks Disporapar, KOTA	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.012	Penghapusan Asset	Jumlah pekerjaan penghapusan aset yang sudah tidak layak (paket)	2	10.904.000,00	10.904.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.014	Penyusunan Laporan Barang milik Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	6	81.397.000,00	81.397.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.015	Penjualan asset daerah	Jumlah paket Barang Milik Daerah yang disetujui untuk dijual (Paket)	1	22.000.000,00	22.000.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.017	Penaksiran barang milik daerah	Jumlah kegiatan penaksiran Barang Milik Daerah (Kegiatan)	2	16.895.000,00	16.895.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.018	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pembinaan pengelolaan BMD kepada petugas pengelola BMD OPD. (Kegiatan)	4	49.425.000,00	49.425.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.019	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan optimalisasi pemanfaatan BMD sesuai kategori. (Kegiatan)	3	37.583.000,00	37.583.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.020	Penyusunan Rencana Kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. (Dokumen)	10	41.920.000,00	41.920.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.023	Pensertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset tanah Pemkot. (Dokumen)	12	323.081.000,00	323.081.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.024	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	Laporan data tanah milik Pemerintah (Laporan)	2	181.212.000,00	181.212.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.026	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Perpanjangan 10 STNK kendaraan dan KIR 5 bus (Unit)	10	20.200.000,00	20.200.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.027	Penyediaan jasa pembayaran PBB gedung kantor/rumdin/mess	Jumlah pembayaran PBB untuk gedung kantor/Rumdin/Mess. (SPPT)	20	28.500.000,00	28.500.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.028	Penyediaan jasa pembayaran PBB tanah pmda	Jumlah pembayaran PBB tanah milik Pmda (Bidang)	123	36.900.000,00	36.900.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)	Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.04.4.04.0101.19.029	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah			63.740.000,00			Tidak	Tidak	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

			Data BMD yang mutakhir. (Kegiatan)				1	63.740.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)							
	4.04.4.04.0101.19.030	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/mess	Rumah dinas dan mess yang terpelihara selama 1 tahun. (Bangunan)				5	245.628.000,00 245.628.000,00	(Rumah dinas dan mess milik Pemerintah Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.19.031	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas Pengelola Barang yang terpelihara. (Unit)				10	265.834.000,00 265.834.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.19.034	Penyediaan Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jasa pengelolaan Barang Milik Daerah (Bulan)				12	107.105.000,00 107.105.000,00	(BPKAD Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.19.044	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Dinas/Mess Barang Pengelola	Perlengkapan rumah dinas/mess Pengelola Barang yang terpelihara (Jenis)				4	8.486.000,00 8.486.000,00	(Rumah dinas/mess milik Pemerintah Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	4.04.4.04.0101.19.046	Penyelesaian Status Aset Komplek Kantor Pemkot	Tanah untuk bangunan tempat kerja (lokasi)				1	15.000.000.000,00 15.000.000.000,00	(Kota Magelang, KOTA MAGELANG)		Tidak	Tidak				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Kota Magelang selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021. Tujuan penyusunan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 serta mengacu pada perencanaan tahun kelima Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2019 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2021, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang dilaksanakan pada tahun 2021. Rencana Kerja tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020.

Regulasi dasar penyusunan perencanaan adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
2. Rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Dengan demikian maka dokumen Renja BPKAD Kota Magelang ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi BPKAD Kota Magelang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai fungsinya, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya dan juga untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Renja BPKAD Kota Magelang tahun 2021 ini merupakan bagian dari keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program kegiatan bidang tahun 2021 sehingga akan menjadi landasan setiap bidang dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pula maka penyusunan Renja BPKAD Kota Magelang Tahun 2021 dilaksanakan dengan koordinasi antar bidang di lingkungan BPKAD Kota Magelang sehingga menghasilkan kesepakatan terutama

sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan menjadi prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2021.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2020, muncul isu global yang berpengaruh sampai tingkat nasional, dan regional dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease (COVID) -19 yang berdampak pada situasi ekonomi dan sosial serta penurunan kemampuan keuangan daerah yang antara lain dikarenakan penurunan dana transfer dari Pusat dan penurunan pendapatan asli daerah. Memperhatikan hal tersebut maka fokus pelayanan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian pokok dalam penyusunan rencana kerja di tahun 2021. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dokumen Renja BPKAD Kota Magelang 2021 menjadi acuan resmi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, maka kaidah pelaksanaannya adalah mempedomani penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Renja ini disusun dengan mengikuti regulasi baru dalam penganggaran sebagaimana diamantkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Triwulan II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Demikian agar dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Magelang secara bertahap di tahun kelima periode RPJMD Kota Magelang 2016 – 2021.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KOTA MAGELANG



WAWAN SETIADI, SE, MA, M.SE

NIP. 19731014 199903 1 004